PENGARUH RASIO KETERGANTUNGAN DAERAH, PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2011-2020

SKRIPSI

Oleh :

ISTIANA

NIM : G71217036

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI

SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Istiana

NIM : G71217036

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi

Judul Skripsi : Pengaruh Rasio Ketergantungan Daerah, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bangkalan Tahun 2011-2020.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang memang dirujuk menggunakan sumber aslinya.

Surabaya, 25 November 2021

Saya yang menyatakan,

Istiana

NIM. G71217036

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Istiana NIM. G71217036 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 2 Desember 2021

Dosen Pembimbing

Dr. Akhmad Yunan Atho'illah, M.Si
NIP. 198101052015031003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Istiana NIM, G71217036 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 19 Januari 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Prodi Ilmu Ekonomi.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,	**Penguji II,**
Dr. Akhmad Yunan Atho'illah, M.Si	**H. Ahmad Mansur, BBA., MEI., MA**
NIP. 198101052015031003	NIP. 197109242003121003
Penguji III,	**Penguji IV,**
Ana Toni Roby Candra Yudha, M.SEI	**Abdullah Kafabih, S.EI., M.SE.**
NIP. 201603311	NIP. 199108072019031006

Surabaya, 24 Januari 2022

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya

Dekan,

Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM

NIP. 192621241993031002

PERSETUJUAN PUBLIKASI

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ISTIANA
NIM : G71217036
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/ILMU EKONOMI
E-mail address : istiana.12.isti@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
PENGARUH RASIO KETERGANTUNGAN DAERAH, PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2011-2020

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Januari 2022

Penulis

(Istiana)
nama terang dan tanda tangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Pengaruh Rasio Ketergantungan Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bangkalan Tahun 2011-2020" ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan parsial antara Rasio Ketergantungan Daerah, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bangkalan tahun 2011-2020. Jenis penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Pemerintahan Kabupaten Bangkalan. Dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda menggunakan bantuan program Stata 13 dengan data *time series*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh simultan dari variabel rasio ketergantungan daerah, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bangkalan. Hal ini terbukti dengan diperoleh persamaan regresi model Y = 60,35552 - 2,932525 – 0,0016825 + 0,0153826 + e. Dan secara parsial variabel rasio ketergantungan daerah di Kabupaten Bangkalan tidak berpengaruh signifikan dengan nilai probabilitas 0,485 dan t hitung sebesar -0,74. Begitu juga dengan variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan juga tidak berpengaruh signifikan dengan nilai probabilitas 0,74 dan nilai t hitung sebesar -0,40. Sementara variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bangkalan dengan nilai probabilitas 0,001 dan nilai t hitung sebesar 5,92 .

Pemerintah Kabupaten Bangkalan diharapkan mampu menyediakan sarana pendidikan tingkat lanjutan yang mudah diakses terutama di daerah terpencil serta merehabilitasi gedung-gedung SD dan SLTP, dan mengangkat guru baru untuk ditempatkan pada sekolah yang kekurangan guru. Untuk memperkuat sumber penerimaan serta optimalisasi PAD, pemerintah dapat menggali potensi pariwisata dan budaya lokal untuk menarik wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri.

Kata Kunci : Rasio Ketergantungan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Indeks Pembangunan Manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR GAMBAR xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Tujuan Penelitian 12

D. Manfaat Penelitian 12

BAB II KAJIAN PUSTAKA 14

A. Landasan Teori 14

1. Teori Federalisme Fiskal 14

2. Rasio Ketergantungan 16

3. Pengeluaran Pemerintah 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Indeks Pembangunan Manusia 22

B. Penelitian Terdahulu 27

C. Kerangka Konseptual 33

D. Hipotesis Penelitian 35

BAB III METODE PENELITIAN 36

A. Jenis Penelitian 36

B. Waktu dan Tempat Penelitian 36

C. Variabel Penelitian 37

D. Definisi Operasional 37

1. Rasio Ketergantungan Daerah 37

2. Pengeluaran Pemerintah Daerah Sektor Pendidikan 38

3. Pengeluaran Pemerintah Daerah Sektor Kesehatan 38

4. Indeks Pembangunan Manusia 38

E. Data dan Sumber Data 39

1. Data 39

2. Sumber Data 39

F. Teknik Pengumpulan Data 39

G. Teknik Analisis Data 40

BAB IV HASIL PENELITIAN 48

A. Gambar Umum Kondisi Daerah 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kondisi Geografis 48

2. Demografis Penduduk 50

3. Kondisi Rasio Ketergantungan Daerah 51

4. Kondisi Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan 54

5. Kondisi Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan..... 56

6. Kondisi Indeks Pembangunan Manusia 59

B. Analisis Data 61

1. Regresi Linier Berganda 61

2. Uji Asumsi Klasik 63

3. Uji Statistik 70

4. Analisis Determinasi (R^2) 73

BAB V PEMBAHASAN 74

A. Pengaruh Variabel Bebas Secara Simultan terhadap Variabel Terikat .. 74

B. Pengaruh Variabel Bebas Secara Parsial terhadap Variabel Terikat..... 75

1. Pengaruh Rasio Ketergantungan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bangkalan Tahun 2011-2020 75

2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bangkalan Tahun 2011-2020 80

3. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bangkalan Tahun 2011-2020 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB VI PENUTUP 94

A. Kesimpulan..... 94

B. Saran..... 95

DAFTAR PUSTAKA 96

LAMPIRAN..... 100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2019-2020 4

Tabel 1. 2 Alokasi Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Bangkalan Tahun 2011-2020..... 8

Tabel 2. 1 Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah..... 17

Tabel 2. 2 Penelitian-Penelitian Sebelumnya 27

Tabel 4. 1 Rasio Ketergantungan Daerah 52

Tabel 4. 5 Hasil Uji Statistik..... 62

Tabel 4. 6 Hasil Uji Shapiro-Francia 64

Tabel 4. 7 Hasil Uji Multikolinearitas (VIF) 67

Tabel 4. 8 Hasil Uji Autokorelasi (B-Godfray) 69

Tabel 4. 9 Hasil Uji Simultan (Uji F) 70

Tabel 4. 10 Hasil Uji Statistik T (Parsial)..... 71

Tabel 5. 1 Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011-2020 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur, 2014-2020 2

Gambar 1. 2 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kab. Bangkalan 2011-2020..... 3

Gambar 4. 1 Peta Kabupaten Bangkalan 48

Gambar 4. 2 Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan 2011-2020 (Miliar) 55

Gambar 4. 3 Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan 2011-2020 (Miliar)..... 57

Gambar 4. 4 Grafik IPM Kabupaten Bangkalan Tahun 2011-2020 60

Gambar 4. 5 Hasil Uji Grafik Indeks Pembangunan Manusia..... 64

Gambar 4. 6 Hasil Uji Grafik Rasio Ketergantungan 65

Gambar 4. 7 Hasil Uji Grafik Pengeluaran 66

Gambar 4. 8 Hasil Uji Grafik Pengeluaran 66

Gambar 4. 9 Hasil Uji Heteroskedastisitas 68

Gambar 5. 1 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur 83

Gambar 5. 2 Angka Harapan Hidup Penduduk Bangkalan Tahun 2011-2020..... 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Sekunder Penelitian 101

Lampiran 2 Hasil Uji Regresi Linear Berganda 101

Lampiran 3 Hasil Uji Normalitas..... 102

Lampiran 4 Hasil Uji Multikolinearitas..... 104

Lampiran 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas..... 104

Lampiran 6 Hasil Uji Autokorelasi..... 105

Lampiran 7 Hasil Uji Statistik 105

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran komparatif dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. Pemerintah melaksanakan pembangunan nasional melalui upaya pembangunan manusia Indonesia yang adil, sejahtera dan berjiwa merdeka. Pembangunan nasional dilakukan dengan menggunakan setiap kapasitas, manifestasi, dan modal negara, dengan berfokus pada unsur-unsur dan keadaan, seperti iklim serta perbedaan lingkungan eksternal bangsa lain yang dapat menjadi faktor pendukung atau kompetitor dalam mencapai cita-cita pembangunan manusia.[1]

Selama periode 2014-2020, pembangunan manusia mengalami perbaikan atau peningkatan di Jawa Timur. Hasil IPM Jawa Timur pada tahun 2014 tercatat sebesar 68,14 dan tahun 2020 diperoleh nilai IPM sebesar 71,71. Selama tahun 2014-2020 IPM Jawa Timur tumbuh sebesar 5,24 persen, dan rata-rata tumbuh sebesar 0,86 persen setiap tahunnya.

---

[1] Yusniah Anggraini, *Kebijakan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia* (Jakarta Selatan: INDOCAMP, 2018), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

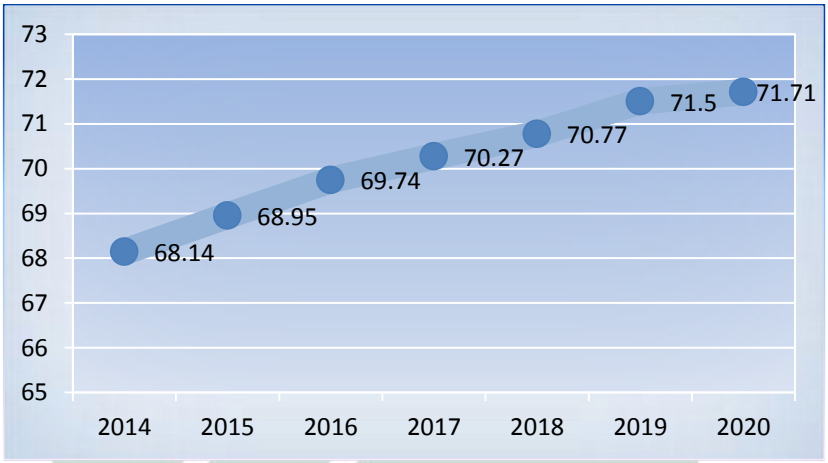

Sumber : BPS Prov. Jawa Timur, diolah

Gambar 1. 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur, 2014-2020

Hasil tersebut menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan pembangunan manusia di Jawa Timur sudah cukup berhasil. Terdapat 4 kabupate/kota yang berkategori "sangat tinggi", 20 kabupate/kota dengan pembangunan manusia berkategori "tinggi", dan sisanya sebanyak 14 kabupaten berkategori "sedang". Untuk mencegah terjadinya ketimpangan pembangunan manusia, maka pemerintah terus melakukan upaya untuk meningkatkan kinerja pembangunan manusianya. Dengan melihat hasil kondisi pembangunan manusia di 14 kabupaten yang masih tergolong "sedang", diupayakan agar dapat mengejar ketertinggalan dan mampu mencapai pembangunan berkategori "tinggi".

Berdasarkan data BPS, mulai periode 2011 hingga 2020, terlihat bahwa IPM Kabupaten Bangkalan terus mengalami peningkatan. Perkembangan IPM Bangakalan dalam 10 tahun terakhir ini, menunjukkan rata-rata tiap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahunnya mengalami peningkatan sebesar 0,6%. Berikut adalah grafik perkembangan IPM Kabupaten Bangkalan dati tahun 2011-2020.

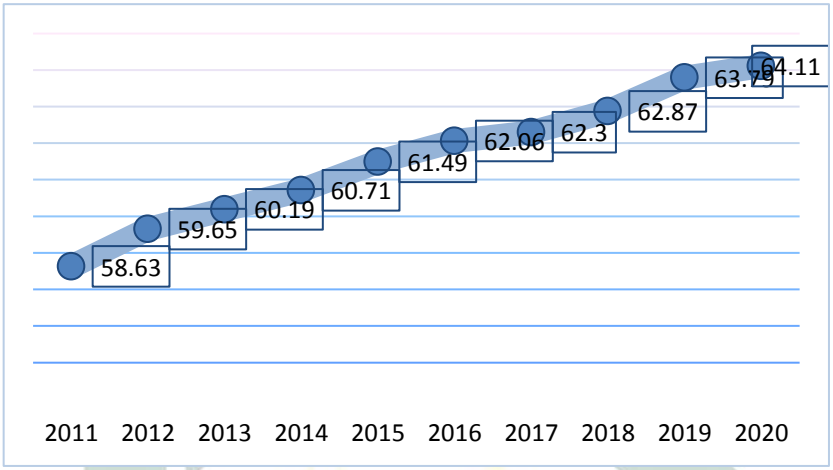

Sumber : BPS Kab. Bangkalan, diolah

Gambar 1. 2 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kab. Bangkalan 2011-2020

Grafik tersebut menunjukkan perkembangan yang positif setiap tahunnya, ini berarti pemerintah Kabupaten Bangkalan sudah cukup berhasil dalam upaya peningkatan pembangunan manusia. Meski demikian, peningkatan tersebut tidak bisa membuat posisi Kabupaten Bangkalan menurut Provinsi Jawa Timur juga meningkat. Terbukti bahwa Kabupaten Bangkalan masih ada di peringkat ke 37 dari 38 kota/ kabupaten di Provinsi Jawa Timur periode 2019-2020, yang dapat ditunjukkan oleh tabel berikut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1. 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2019-2020

Kabupaten/Kota	UHH (Tahun)		HLS (Tahun)		RLS (Tahun)		Pengeluaran (000 Rupiah)		IPM		Peringkat IPM	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Pacitan	71,77	71,94	12,62	12,64	7,28	7,60	9.033	8.796	68,16	68,39	29	29
Ponorogo	72,65	72,77	13,72	13,73	7,21	7,54	9.883	9.670	70,56	70,81	22	20
Trenggalek	73,59	73,75	12,25	12,35	7,28	7,55	9.865	9.630	69,46	69,74	25	25
Tulungagung	73,95	74,08	13,15	13,31	8,07	8,33	10.891	10.705	72,62	73,00	15	14
Blitar	73,39	73,52	12,45	12,46	7,29	7,39	10.861	10.654	70,57	70,58	21	22
Kediri	72,54	72,61	12,88	13,15	8,01	8,02	11.146	11.000	71,85	72,05	17	17
Malang	72,45	72,55	13,17	13,18	7,27	7,42	10.270	10.028	70,35	70,36	24	24
Lumajang	69,94	70,10	11,80	11,81	6,22	6,40	9.274	9.088	65,33	65,46	36	36
Jember	68,99	69,15	13,22	13,42	6,18	6,48	9.525	9.294	66,69	67,11	31	31
Banyuwangi	70,54	70,65	12,78	12,80	7,13	7,16	12.264	12.140	70,60	70,62	20	21
Bondowoso	66,55	66,74	13,27	13,28	5,71	5,93	10.665	10.610	66,09	66,43	33	32
Situbondo	68,97	69,13	13,14	13,15	6,12	6,46	10.097	9.857	67,09	67,38	30	30
Probolinggo	67,00	67,20	12,34	12,35	5,77	6,11	10.972	10.859	65,60	66,07	35	35
Pasuruan	70,17	70,23	12,31	12,41	7,11	7,40	10.381	10.164	68,29	68,60	28	27
Sidoarjo	73,98	74,04	14,91	14,93	10,25	10,50	14.609	14.458	80,05	80,29	4	4
Mojokerto	72,43	72,53	12,61	12,88	8,49	8,51	12.860	12.779	73,53	73,83	11	12
Jombang	72,27	72,40	13,00	13,27	8,53	8,54	11.533	11.261	72,85	72,97	14	15
Nganjuk	71,44	71,54	12,85	12,86	7,63	7,64	12.200	12.130	71,71	71,72	18	19
Madiun	71,22	71,38	13,14	13,16	7,80	7,81	11.650	11.574	71,69	71,73	19	18
Magetan	72,49	72,59	14,00	14,03	7,96	8,24	11.779	11.776	73,49	73,92	12	11
Ngawi	72,16	72,30	12,69	12,70	6,98	7,06	11.468	11.418	70,41	70,54	23	23
Bojonegoro	71,36	71,56	12,36	12,39	7,09	7,33	10.265	10.121	68,75	69,04	26	26
Tuban	71,26	71,43	12,20	12,21	6,81	6,95	10.499	10.238	68,37	68,40	27	28
Lamongan	72,27	72,40	13,47	13,48	7,89	7,92	11.572	11.456	72,57	72,58	16	16
Gresik	72,61	72,66	13,72	13,73	9,29	9,30	13.295	13.246	76,10	76,11	8	8
Bangkalan	70,11	70,18	11,59	11,60	5,66	5,95	8.718	8.610	63,79	64,11	37	37
Sampang	67,96	68,03	12,08	12,37	4,55	4,85	8.760	8.739	61,94	62,70	38	38
Pamekasan	67,45	67,58	13,63	13,64	6,40	6,69	8.834	8.739	65,94	66,26	34	34
Sumenep	71,22	71,41	13,19	13,20	5,46	5,71	9.082	8.888	66,22	66,43	32	32
Kota Kediri	73,96	74,02	14,97	15,26	9,92	9,93	12.440	12.239	78,08	78,23	6	6
Kota Blitar	73,60	73,75	14,31	14,32	10,10	10,11	13.851	13.733	78,56	78,57	5	5
Kota Malang	73,15	73,27	15,41	15,51	10,17	10,18	16.666	16.593	81,32	81,45	2	2
Kota Probolinggo	70,19	70,29	13,57	13,59	8,69	8,70	12.280	12.180	73,27	73,27	13	13
Kota Pasuruan	71,40	71,52	13,60	13,62	9,11	9,12	13.393	13.281	75,25	75,26	10	10
Kota Mojokerto	73,21	73,32	13,83	14,00	10,24	10,25	13.710	13.499	77,96	78,04	7	7
Kota Madiun	72,75	72,81	14,39	14,40	11,13	11,14	16.040	16.018	80,88	80,91	3	3
Kota Surabaya	74,13	74,18	14,79	14,80	10,47	10,49	17.854	17.755	82,22	82,23	1	1
Kota Batu	72,54	72,61	14,12	14,13	9,06	9,07	12.870	12.824	75,88	75,90	9	9

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keterangan :

UHH : Umur Harapan Hidup saat lahir

HLS : Harapan Lama Sekolah

RLS : Rata-rata Lama Sekolah

Umur harapan hidup saat lahir (UHH) Kabupaten Bangkalan tahun 2019 diperoleh angka sebesar 70,11 dan tahun 2020 meningkat menjadi 70,18. Ini menunjukkan bahwa terdapat perbaikan pada kualitas pembangunan dimensi kesehatan di Kabupaten Bangkalan. Sehingga pembangunan di bidang kesehatan ini dapat dinikmati oleh masyarakat..

Untuk dapat mengetahui dimensi pengetahuan pada pembangunan manusia, maka dapat dilihat berdasarkan dua indikator, yakni harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Nilai HLS dan RLS yang mengalami peningkatan maka dapat diartikan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Bangkalan perlahan sudah mengalami kemajuan. Angka harapan lama sekolah yang mengalami peningkatan menunjukkan bahwa penduduknya mulai semakin banyak yang bersekolah atau menempuh pendidikan. Harapan lama sekolah di kabupaten Bangkalan Tahun 2020 menunjukkan angka sebesar 11, 6 tahun, ini menunjukkan bahwa anak yang berusia 7 tahun akan memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan sampai lulus SLTA. Sementara itu, nilai RLS pada tahun 2020 mencapai 5,95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun, artinya penduduk Kabupaten Bangkalan untuk usia di atas 25 tahun rata-rata telah mengenyam pendidikan SD kelas enam.

Kemampuan daya beli masyarakat tahun 2020 di Kabupaten Bangkalan mengalami penurunan yakni Rp 8,61 juta dibanding tahun sebelumnya yaitu Rp 8,7 juta (2019). Ketidaktetapan kemampuan daya beli masyarakat tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni pendapatan, selera,harga dan kualitas.

Meski terjadi peningkatan pada setiap komponen IPM Kabupaten Bangkalan, namun tidak dapat menaikkan peringkat IPM. IPM Bangkalan masih berada di urutan ke 37 dari 38 kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur periode 2019 dan 2020. IPM kabupaten Bangkalan tahun 2020 tercatat sebesar 64,11 yang menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Bangkalan masih tergolong “sedang” (60<=IPM<70). Rendahnya IPM Kabupaten Bangkalan ini disebabkan oleh kegagalan mencapai target indikator rerata lama sekolah. Pada dimensi ini, rerata lama sekolah Kabupaten Bangkalan tercatat sebesar 5,95 tahun. Namun program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah mensyaratkan warga negara menempuh pendidikan selama 9 tahun, atau sampai lulus SMA/SMK. Hal ini tentu dipengaruhi oleh sarana dan prasarana yang tidak memadai. Untuk itu perlu diimbangi dengan ketersediaan sekolah tingkat lanjutan dan mudah diakses. Begitu pula dukungan dari masyarakat setempat (budaya). Seperti budaya kawin pada usia muda dapat menjadi hambatan anak-anak untuk meneruskan sekolah pada jenjang lanjutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ukuran dasar dari pendidikan seseorang adalah kemampuannya untuk membaca ataupun menulis. Kemampuan membaca dan manulis ini merupakan ukuran dasar tingkat pendidikan yang dilihat dari usia 15 tahun keatas. Kabupaten Bangkalan dengan angka buta huruf yang tinggi, perlu adanya perbaikan kualitas pendidikan sehingga kualitas sumber daya manusia menjadi lebih baik. Salah satunya dengan cara menambah unit gedung baru dengan prioritas pada daerah yang angka partisipasi sekolahnya masih rendah dan daerah terpencil serta merehabilitasi gedung-gedung SD dan SLTP dengan prioritas gedung yang rusak berat, dan mengangkat guru baru untuk ditempatkan pada sekolah yang kekurangan guru. Serta perlu adanya kesadaran dari masyarakat, jika kesadaran masyarakat untuk bersekolah tidak sebanding dengan jumlah penduduk, maka akan berpengaruh pada lambannya IPM. Untuk mengurangi rendahnya kesadaran dari masyarakat akan pendidikan perlu diadakan sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan bagi kehidupan, dan mengadakan kegiatan pendidikan di daerah terpencil secara gratis, serta membuat program beasiswa untuk masyarakat yang membutuhkan.

Dalam pembangunan ekonomi di negara maju dan berkembang, pembangunan manusia justru menjadi perhatian utama. Modal manusia menjadi faktor yang mempengaruhi pembangunan manusia dan memiliki dua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aspek utama yakni pendidikan dan kesehatan.[2] Pendidikan dan kesehatan ini juga adalah tujuan dari pembangunan. Pendidikan dan kesehatan dapat diwujudkan melalui alokasi pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan. Jika alokasi pengeluaran pemerintah untuk kedua sektor tersebut mengalami peningkatan, maka akan beperngaruh pada produktivitas penduduk sehingga akan menyebabkan terjadinya peningkatan pada pembangunan manusia.[3]

Tabel 1. 2 Alokasi Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Bangkalan Tahun 2011-2020

Tahun	Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (Miliar)	Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (Miliar)
2011	547.552	98.642
2012	508.449	133.753
2013	526.901	181.759
2014	605.590	290.505
2015	668.727	287.247
2016	662.340	327.611
2017	554.364	334.331
2018	632.249	372.044

[2] Seyed Mohammad dan Javad Razmi, "Investigating the Effect of Government Health Expenditure on HDI in Iran," *Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology* 2, no. 5 (2012): 126–139.

[3] Meylina Astri, Sri Indah Nikensari, dan Harya Kuncara W., "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehata Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (JPEB)* 1, no. 1 (2013): 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2019	689.045	406.265
2020	682.615	417.902

Sumber : DJPK, diolah

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan cenderung fluktuatif sementara sektor kesehatan cenderung meningkat selama periode 2011 hingga periode 2020. Adanya peran pemerintah melalui pengeluaran yang dikhususkan untuk sektor pendidikan dan kesehatan ini, dapat menjadi harapan bagi masyarakat untuk memperoleh kemudahan dalam mengakses dan memenuhi pendidikan serta fasilitas dan pelayanan kesehatan.

Sebagian besar alokasi anggaran dari pemerintah untuk daerah kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur, masih dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dana rutin pemerintah. Alokasi anggaran ini bersumber dari dana perimbangan, yang habis terserap untuk menutupi kebutuhan rutin pemerintah daerah. Akibatnya, ketika anggaran untuk pemerintah daerah ini belum dikembangakan dengan baik untuk memenuhi modal pembangunan, maka anggaran tersebut akan terjebak dalam politik yang boros dan kaku.[4]

Daerah yang dianggap mandiri dengan kondisi keuangan yang baik apabila rasio ketergantungan daerah terhadap transfer pemerintah pusat

[4] Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis, "Empirical Study about The Interaction Between Equalization Funds, Regional Financial and Human Development Index in Regional Economic," *International Journal of Economics and Finance* 7, no. 1 (2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tergolong rendah. Kondisi keuangan daerah yang cukup baik akan menguatkan kualitas pelayanan publik, sebagai akibatnya mempertinggi indeks pembangunan manusia (IPM).[5] Dalam penelitiannya Widiyatama (2017) mengutarakan bahwa rasio ketergantungan daerah mempunyai hubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap IPM. Jika ketergantungan keuangan daerah semakin rendah, akan mengakibatkan indeks pembangunan manusia meningkat.[6]

Hasil penelitian Eka et.al (2012), dengan menggunakan data tahun 2003 hingga 2014, mendapatkan hasil bahwa pengeluaran pemerintah pertama, tidak bepengaruh dominan terhadap PDRB di Kalimantan Timur. Kedua, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan juga menunjukkan hasil yang sama, yakni tidak berpengaruh terhadap IPM di Kalimantan Timur. Ini diakibatkan oleh kebijakan daerah yang masih belum tepat sasaran dalam mengupayakan pengaturan untuk pembelajaran yang proporsional, efisien dan efektif.[7] Kemudian studi lain yang sejenis juga dilakukan oleh Nur Baeti (2013), menunjukkan hasil yang berbeda bahwa pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan memberi pengaruh positif serta

---

[5] Djody Bintang Hudaya, "Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017)," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–1699.

[6] Andin Widyatama, "Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia" (Skripsi pada FEB Universitas Lampung, 2017).

[7] Agustina Eka, Rochaida Eny, dan Ulfah Yana, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap PDRB Serta IPM Di Kalimantan Timur," *Jurnal Ekonomi Keuangan, dan Manajemen* 12, no. 2 (2016), http://journal.feb.unmul.ac.id/.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

signifikan terhadap IPM di Jawa Tengah. Sehingga diharapkan dengan membaiknya pelayanan pendidikan serta kesehatan, maka mutu pembangunan manusia akan meningkat.[8]

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu ini, menunjukkan bahwa dalam hasil tersebut masih terdapat celah (gap). Yaitu dalam hasil penelitian tersebut tidak dapat menunjukkan hasil yang konsisten. Hal ini yang menjadikan peneliti tertarik untuk membuktikan hasil dari pengaruh variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan terhadap IPM Kabupaten Bangkalan dengan menambahkan variabel lain yakni rasio ketergantungan daerah untuk dapat menilai kemandirian suatu daerah yang ditunjukkan oleh kecilnya rasio ketergantungan daerah terhadap dana dari pemerintah pusat.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul "Pengaruh Rasio Ketergantungan dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bangkalan Tahun 2011-2020".

B. Rumusan Masalah

1 Apakah rasio ketergantungan daerah, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh secara simultan terhadap IPM di Kabupaten Bangkalan tahun 2011-2020?

---

[8] Nur Baeti, "Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011," *Economics Development Analysis Journal* 2, no. 3 (2013): 85–98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2 Apakah rasio ketergantungan daerah, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh secara parsial terhadap IPM di Kabupaten Bangkalan tahun 2011-2020?

C. Tujuan Penelitian

1 Untuk mengidentifikasi apakah ada pengaruh secara simultan antara variabel rasio ketergantungan daerah, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bangkalan tahun 2011-2020

2 Untuk mengidentifikasi apakah ada pengaruh secara parsial antara variabel rasio ketergantungan daerah, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bangkalan tahun 2011-2020.

D. Manfaat Penelitian

1 Manfaat untuk penulis, berguna untuk meningkatkan kadar keilmuan, menambah wawasan di bidang ekonomi sehingga dapat meningkatkan kualitas diri dalam hal intelektualitas dan mampu menganalisis teori-teori yang telah diperoleh pada perkuliahan untuk dapat dikaitkan pada permasalahan ekonomi.

2 Manfaat bagi pemerintah Kabupaten Bangkalan, diharapkan dapat memberikan informasi terkait pengaruh rasio ketergantungan daerah dan pengeluaran pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan ketika menyusun kebijakan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bangkalan.

3 Manfaat bagi semua pihak adalah sebagai bahan referensi yang dapat dijadikan pembanding oleh peneliti yang ingin mengkaji dan meneliti permasalahan ini serta menambah variabel lain yang ikut memberi pengaruh pada perkembangan indeks pembangunan manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Federalisme Fiskal

Federalisme fiskal merupakan hubungan keuangan antar pemerintah, yang mana sistemnya menempatkan program pemerintah pada tingkat yang berbeda. Federalisme fiskal ini merupakan pedoman yang digunakan oleh pemerintah dalam rangka mengatur keuangan baik di tingkat nasional ataupun sub nasional. Federalisme fiskal dilaksanakan oleh beberapa negara yang mempraktikkan desentralisasi fiskal. Federalisme fiskal adalah pemerintah tingkat II (kabupaten/kota) yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, negara yang menggunakan sistem federal ini, tidak menempatkan pemerintahan negara sebagai pelaku otonom. Sistem federalisme dan fiskal memiliki hubungan yang berdampak pada bentuk transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Untuk dapat mengaplikasikan program desentralisasi fiskal ini, maka setiap daerah diwajibkan menyediakan dana untuk biaya pembangunannya sendiri. Dan dengan adanya bantuan dana transfer dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah pusat akan menjadi sumber pendapatan yang sangat penting bagi pemerintah daerah.[9]

Menurut Oates, meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh desentralisasi fiskal, disebabkan pemerintah daerah akan menjadi lebih efisien untuk memproduksi dan menyediakan barang publik. Desentralisasi fiskal juga berdampak pada efisiensi okonomi, yang terkait dengan dinamika pertumbuhan ekonomi. Dibandingakan dengan kebijakan pemerintah pusat, pengeluaran pemerintah daerah untuk sektor infrastruktur dan sosial lebih berpeluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.[10]

Menurut Bahl, berpendapat bahwa desentralisasi fiskal dilaksanakan berdasarkan prisnsip *money should follow function* sebagai sebuah prinsip yang wajib dilaksanakan. Dengan kata lain, penyerahan kewenangan pemerintahan akan berdampak pada kebutuhan anggaran dalam menjalankan kewenangan tersebut. Semakin banyak kewenangan yang harus dijalankan dengan baik, maka mengakibatkan biaya yang dibutuhkan oleh daerah juga semakin besar.[11]

---

[9] Ferry Prasetyia, *Bagian VIII: Federalisme* (Malang: Universitas Brawijaya, 2013), 2.
[10] Ibid., 21.
[11] Ibid., 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan dapat diketahui nilainya dengan cara membandingkan jumlah dana trasnfer dari pusat dengan total penerimaan daerah . Rasio ketergantungan merupakan rasio untuk mengetahui besarnya tingkat ketergantungan daerah terhadap dana publik. Tingginya nilai rasio ketergantungan daerah, mengakibatkan keuangan daerah akan semakin bergantung terhadap dana trasfer dari pusat.[12] Menurut Halim (2007), bahwa ketergantungan fiskal suatu daerah ditentukan oleh jumlah pendapatan transfer dan pendapatan dari sumber-sumber lain daerah tersebut (Pendapatan Asli Daerah).

$$Rasio\ Ketergantungan = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Penerimaan Daerah}}\ x\ 100\%$$

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pasal 1 ayat 18, Dana Perimbangan merupakan alokasi dana dari APBN untuk Daerah dalam rangka mendanai kebutuhan daerah sebagai perwujudan dari desentralisasi. Dana perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi adanya kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah.

Menurut Bisma dan Susanto (2010), Ketergantungan daerah dibagi dalam 6 tingkatan mulai dari tingkat ketergantungan yang sangat rendah

[12] Windhu Putra, *TATA KELOLA EKONOMI KEUANGAN DAERAH* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hingga paling tinggi. Di bawah ini terdapat sebuah tabel kriteria tingkat ketergantungan daerah.[13]

Tabel 2. 1 Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah

Presentase	Tingkat Ketergantungan
0,00 – 10,00	Sangat Rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

Sumber : *Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991*

3. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah ialah pengeluaran yang dipakai dalam rangka mendanai pelaksanaan kegiatan negara atau daerah, agar tugasnya menjamin kesejahteraan masyarakat dapat dijalankan dengan baik.[14] Pengeluaran pemerintah dapat dikategorikan seperti di bawah ini:

1). Pengeluaran untuk investasi, di mana pengeluaran ini diupayakan memperkuat ekonomi di masa mendatang.

[13] I Dewa GDE Bisma dan Hery Susanto, "Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007," *Ganec Swara* 4, no. 3 (2010): 75–86.

[14] Amiruddin Idris, *EKONOMI PUBLIK* ..., 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2). Pengeluaran langsung, yakni dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat.

3). Pengeluaran untuk tabungan, yang digunakan sebagai pengeluaran di masa yang akan datang.

4). Pengeluaran yang digunakan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan daya beli.

a. Model Pembangunan dan Pengeluaran Pembangunan

Teori yang dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave, menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan.[15] Tahap pertama pembangunan ekonomi, investasi publik merupakan bagian terbesar dari total investasi, disebabkan pemerintah wajib untuk menyediakan infrastruktur untuk menunjang perkembangan ekonomi selain itu pemerintah diwajibkan menyiapkan sarana dan prasarana untuk menaikkan mutu sumber daya manusianya.

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, di mana investasi dari swasta memiliki peranan besar. Namun pemerintah juga ikut andil dan berperan penting dalam tahap pembangunan ini , karena semakin bertambah besarnya peran swasta akan timbul akibat seperti kegagalan pasar, sehingga mengharuskan untuk lebih banyak

[15] Ibid, 32-34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyediakan barang dan jasa publik. Karena masalah tersebut tidak bisa diselesaikan oleh pihak swasta, maka pemerintah harus turun tangan.

Dan untuk tahap akhir pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah bukan untuk menyediakan sarana dan prasarana tetapi menyediakan belanja untuk kegiatan sosial. Kegiatan sosial ini merupakan program kesejahteraan hari tua, pelayanan kesehatan, dll.

b. Hukum Wagner

Teori Adolf Wagner mengutarakan bahwa pengeluaran pemerintah dan aktivitas pemerintah terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Wagner menyebut tren ini sebagai hukum, yang selalu memainkan peran penting dalam pemerintahan. Inti dari teori ini adalah bahwa peran pemerintah dalam perekonomian menjadi semakin penting. Terkait hukum Wagner, terdapat beberapa alasan pengeluaran pemerintah meningkat, diantaranya :

1). Peningkatan fungsi keamanan dan ketertiban

2). Peningkatan fungsi kesejahteraan

3). Peningkatan fungsi perbankan

4). Peningkatan fungsi pembangunan

Wagner mengemukakan teori tentang meningkatnya pengeluaran pemerintah, diakibatkan oleh peningkatan PDB dari waktu ke waktu.. Wagner mengungkapkan bahwa ketika pendapatan per kapita naik,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan menyebabkan pengeluaran pemerintah juga naik. Dasar dari Hukum Wagner ini disebut dengan "*The Law of Expanding State Expenditure*". Studi pengamatan empiris di negara-negara maju merupakan dasar dari hukum ini.[16]

c. Teori Peacock dan Wiseman

Teori Peacock dan Wiseman ini adalah terdapat pada gagasan yang menyatakan pemerintah akan terus berupaya meningkatkan pengeluaran, meskipun masyarakatnya tidak bersedia membayar pajak lebih banyak untuk mendanai pengeluaran pemerintah. Pada level ini, masyarakat mengerti seberapa besar pajak yang harus dipungut oleh pemerintah. Dan toleransi pajak ini akan menjadi penghambat untuk memungut pajak yang sah. Adapun dalam teori ini dinyatakan bahwa meskipun tarif pajak itu tetap, pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan penerimaan pajak, dan ketika penerimaan pajak ini meningkat akan mengakibatkan meningkatnya pengeluaran pemerintah.

Dalam kondisi normal, kenaikan PDB menyebabkan kenaikan penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah. Akan tetapi, dalam kondisi tersebut juga dapat menemukan kendala yang terjadi oleh suatu hal seperti perang dan bencana alam. Jika ini terjadi maka

[16] Ibid, 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah akan menaikkan tarif pajak, sehingga mengurangi investasi swasta dan dana konsumsi. Namun akibat dari hal tersebut, biaya tidak hanya ditanggung oleh pajak tetapi juga diperoleh melalui hutang dari pihak lain. Meski kondisi tersebut telah berakhir pemerintah belum bisa menurunkan tarif pajak, karena pemerintah berkewajiban untuk mengembalikan dana yang telah dipinjam tersebut.

d. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan sumber daya untuk pembangunan, pendidikan dicapai dengan meningkatkan kesempatan yang adil, bermutu, relevan dan kompetitif. Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan merupakan alokasi belanja pemerintah untuk mendanai keperluan pendidikan minimal 20 persen dari APBN. Sedangkan untuk daerah, belanja pemerintah untuk pendidikan dialokasikan minimal 20 persen dari APBD. Alokasi anggaran untuk pendidikan mencerminkan komitmen pemerintah terhadap masyarakat untuk memberi pelayanan di bidang pendidikan.

Secara historis, sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah baru melaksanakan kewenangan UUD 1945 yang menetapkan 20% dari seluruh APBN untuk anggaran pendidikan, yang baru dilaksanakan pada tahun 2010. Pendidikan sangat berperan penting untuk pembangunan suatu negara. Namun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah daerah tidak dapat sepenuhnya merealisasikan anggaran pendidikan dengan sempurna karena terjadi banyak kendala.

e. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan

Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan ialah anggaran yang diperuntukkan untuk kesehatan selain gaji, dengan alokasi minimal 5 persen dari APBN untuk kesehatan. Adapun alokasi untuk daerah paling sedikit 10 persen dari APBD. Lebih lanjut UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 menyebutkan bahwa tanggung jawab pemerintah di bidang kesehatan mencakup penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik di bidang kesehatan ini memberikan hak kepada seluruh rakyat Indonesia secara adil untuk dapat mencapai tingkat kesejahteraan. Pengeluaran publik untuk perlindungan sosial meliputi:

1). Dana perlindungan kesehatan (PBI) jaminan sosial APBN.

2). Dana bantuan sosial (KIP, KPS, PKH, Rastra/Raskin) yang dibuat oleh APBN.

4. Indeks Pembangunan Manusia

Pada tahun 1990, *United Nations Development Programme* (UNDP) memperkenalkan konsep pembangunan manusia melalui laporan *Human Development Report* (HDR).[17]

[17] Badan Pusat Statistik, "Indeks Pembangunan Manusia 2020," last modified 2020, diakses Mei 8, 2021, https://www.bps.go.id.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Definisi Pembangunan Manusia

Beberapa ahli telah mengutarakan bahwa konsep pembangunan memiliki dimensi yang lebih luas dari pada pembangunan konvensional. Amartya Sen (1989) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai bentuk perluasan dalam memperoleh kebebasan bagi manusia. Kebebasan tergantung pada faktor sosial ekonomi seperti akses ke pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan peluang politik. Mahbub ul Haq (1995) memiliki pandangan yang sama dan percaya bahwa pembangunan manusia adalah metode untuk memperluas kesempatan dalam kebebasan berpolitik, peran serta dalam kehidupan publik, kesempatan pendidikan, kelangsungan hidup dan kesehatan, dan menikmati standar hidup yang layak. Kedua ahli tersebut adalah pelopor konsep pembangunan manusia yang digunakan oleh UNDP.

Pembangunan manusia memiliki konsep yang tidak hanya mempertimbangkan pendapatan, tetapi juga pada aspek kesehatan dan pendidikan. UNDP menjelaskan dalam laporannya bahwa rakyat adalah kekayaan negara yang sebenarnya. Pembangunan manusia menggambarkan bahwa manusia tidak hanya berkontribusi pada pembangunan tetapi juga tujuan akhir dari pembangunan. Oleh sebab itu, tujuan utama masyarakat adalah menikmati umur panjang, hidup sehat, dan hidup produktif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dimensi Pembangunan Manusia

Dalam perhitungannya Indeks Pembangunan Manusia dibagi menjadi tiga dimensi :[18]

1). Usia Harapan Hidup

Angka harapan hidup merupakan indikator untuk mengukur (longevity) umur panjang. Harapan hidup masyarakat tidak hanya hasil kerja keras, tetapi juga sejauh mana penggunaan sumber daya yang tersedia bagi masyarakat dan bangsa agar dapat memperpanjang harapan hidup atau umur penduduknya. Berdasarkan teori, manusia dapat berumur panjang dan sehat dan ketika menderita sakit hendaknya berusaha untuk kesembuhannya agar bisa hidup lebih lama. Oleh sebab itu, jika sumber daya masyarakat tidak digunakan untuk pembangunan yang sehat sehingga masyarakat dapat mencegah kematian lebih dini dari yang seharusnya, maka pembangunan masyarakat tidak akan berhasil. Oleh karena itu, variabel angka harapan hidup ini dapat mencerminkan lama hidup dan pola hidup sehat masyarakat.

[18] Anggraini, *Kebijakan Peningkatan Indeks Pembangunan..., 9*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2). Pengetahuan

Dalam kaitannya, tingkat pengetahuan dan pendidikan juga secara luas dianggap sebagai elemen dasar pembangunan manusia. Jika personel yang bersangkutan memiliki kecerdasan yang memadai, harkat kemanusiaan akan meningkat. Keberhasilan pembangunan salah satunya dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat di suatu wilayah menggunakan sumber daya yang dimiliki dan menyediakan fasilitas bagi warganya. Pola hidup sehat dan cerdas dapat meningkatkan produktivitas, sekaligus mempertahankan gaya hidup sehat dalam waktu yang lama. Lingkungan yang cerdas juga akan meningkatkan masa produktif dan menjadikan warga sebagai penggerak pembangunan. Ada dua jenis indikator pendidikan yang terkait dengan IPM ini, yakni angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Kedua indikator pendidikan ini harus mencerminkan tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat.

3). Standar Hidup Layak

Paritas daya beli (Purchasing Power Parity) adalah indikator ekonomi yang mengukur perbandingan harga riil di berbagai daerah. UNDP menggunakan data Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita sebagai alat ukur untuk mengetahui tingkat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesejahteraan. Tetapi untuk tingkat daerah data tersebut tidak tersedia, maka dipilih alternatif lain berupa indikator pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Dan dapat dihitung hingga level kabupaten/kota. Indikator pengeluaran riil per kapita mampu mencerminkan indikator pendapatan masyarakat dan menggambarkan tingkat kesejahteraan. Negara dengan skor IPM yang lebih tinggi dapat diperoleh ketika umur atau usia masyarakatnya lebih panjang, tingkat pendidikan lebih tinggi, dan PDB per kapita lebih tinggi.

c. Perhitungan IPM

Indeks Pembangunan Manusia diukur dalam tiga dimensi, yaitu dimensi kesehatan, pendidikan dan standar hidup yang layak. Untuk melihat implementasi IPM antar daerah, IPM dapat dibedakan menjadi sebagai berikut, jika IPM < 60 = rendah, antara 60 < IPM < 70 = sedang, 70 < IPM < 80 = tinggi, dan jika IPM > 80 = sangat tinggi.

Adapun Rumus untuk menghitung IPM `:

$$IPM = 1/3\ [X(1) + X(2) + X(3)] \ldots\ldots\ldots (1)$$

Di mana :

X(1) : Indeks harapan hidup

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

X(2) : Indeks pendidikan = 2/3(indeks melek huruf) + 1/3(indeks rata-rata lama sekolah)

X(3) : Indeks standar hidup layak

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mempunyai banyak keunggulan di antaranya, IPM menjadi tolak ukur keberhasilan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat yang menentukan tingkat pembangunan di suatu wilayah atau negara, Kinerja pemerintah juga dapat diukur dengan IPM dan IPM juga berperan sebagai salah satu alokator dalam menentukan Dana Alokasi Umum (DAU).

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 2 Penelitian-Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Metode penelitian	Kesimpulan	Perbedaan
1	Zul & Meileni	Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten	Bertujuan mengetahui pengaruh dari rasio keuangan pemerintah daerah terhadap IPM	Kuantitatif, Analisis Regresi Berganda.	Hasil dari penelitian menyatakan bahwa derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio kemandirian, efektivitas PAD dan efektivitas pajak daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap IPM Kabupaten Bengkalis	Penelitian dilakukan di Kabupaten Bangkalan periode 2011-2020. Dengan menambah variabel lain dalam penelitian yakni pengeluaran pemerintah daerah sektor pendidikan dan kesehatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		Bengkalis)				
No	**Nama Peneliti**	**Judul Penelitian**	**Tujuan Penelitian**	**Metode penelitian**	**Kesimpulan**	**Perbedaan**
2	Riva Ubar Harahap	Pengaruh DAU, DAK, dan DBH terhadap IPM Pada Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan	Menganalisis pengaruh simultan dan parsial variabel DAU, DAK dan DBH terhadap IPM	Kuantitatif, Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : a) Terdapat pengaruh simultan antara variabel DAU, DAK, dan DBH terhadap IPM **b)** Semua variabel tidak berpengaruh secara parsial terhadap IPM	Penelitian dilakukan di Kabupaten Bangkalan periode 2011-2020. Dengan menambah variabel lain dalam penelitian yakni rasio ketergantungan daerah
No	**Nama Peneliti**	**Judul Penelitian**	**Tujuan Penelitian**	**Metode penelitian**	**Kesimpulan**	**Perbedaan**
3	Otong Suhyanto et al.	Pengaruh Dana Transfer dan PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat	Menganalisis pendapatan daerah terhadap IPM dan pengaruh paling tinggi terhadap IPM	Kuantitatif, Analisis regresi data panel model *fixed effect*.	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh dari dana transfer dan PAD terhadap peningkatan IPM di Provinsi Jawa Barat	Penelitian dilakukan di Kabupaten Bangkalan periode 2011-2020. Dengan menambah variabel lain dalam penelitian yakni rasio ketergantungan daerah dan pengeluaran pemerintah. Dan adapun penelitian ini menggunakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

						analisis regresi linear berganda
No	**Nama Peneliti**	**Judul Penelitian**	**Tujuan Penelitian**	**Metode penelitian**	**Kesimpulan**	**Perbedaan**
4	Firda & Ida	Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Keserasian Alokasi Belanja terhadap Indeks Pembangunan Manusia	Mengetahui pengaruh kemandirian keuangan daerah dan keserasian alokasi belanja terhadap IPM	Kuantitatif Regresi linear berganda.	Hasil analisis dalam penelitian ini menyatakan bahwa, terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel Kemandirian keuangan daerah dan keserasian alokasi belanja terhadap IPM kabupaten/ kota di Provinsi Bali.	Penelitian dilakukan di Kabupaten Bangkalan periode 2011-2020. Dengan menambah variabel lain dalam penelitian yakni rasio ketergantungan daerah dan pengeluaran pemerintah
No	**Nama Peneliti**	**Judul Penelitian**	**Tujuan Penelitian**	**Metode penelitian**	**Kesimpulan**	**Perbedaan**
5	Eka & Haryadi	Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi	Menganalisis perkembangan pendapatan daerah dan pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap IPM.	Kuantitatif Regresi Berganda	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa a). Derajat desentralisasi, keserasian belanja berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM b). Ketergantungan daerah, efektivitas PAD dan efisiensi PAD tidak	Penelitian dilakukan di Kabupaten Bangkalan periode 2011-2020. Dengan menambah variabel lain dalam penelitian pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

					berpengaruh signifikan terhadap IPM	
No	**Nama Peneliti**	**Judul Penelitian**	**Tujuan Penelitian**	**Metode penelitian**	**Kesimpulan**	**Perbedaan**
6	Nur Baeti	Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011	Menganalisis seberapa besar pengaruh dari variabel di bawah ini terhadap IPM, yakni variabel: a). Pengangguran, b). Pertumbuhan ekonomi c). Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan	Kuantitatif, Analisis regresi data panel FEM dan GLS	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa a). Pengangguran berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM b). Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan c). Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif signifikan	Penelitian dilakukan di Kabupaten Bangkalan periode 2011-2020. Dengan menambah variabel lain dalam penelitian yakni rasio ketergantungan. Dan penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda
No	**Nama Peneliti**	**Judul Penelitian**	**Tujuan Penelitian**	**Metode penelitian**	**Kesimpulan**	**Perbedaan**
7	Nadia Ayu et al.	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia	Menganalisis faktor yang mempengaruhi IPM yakni : a). PDRB, b). Rasio ketergantungan c). Konsumsi d). APBD pendidikan e). APBD kesehatan	Kuantitatif Regresi Linier Berganda	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa : a). PDRB berpengaruh positif terhadap IPM b). Rasio ketergantungan berpengaruh negatif terhadap IPM c). APBD pendidikan tidak berpengaruh terhadap IPM	Penelitian dilakukan di Kabupaten Bangkalan periode 2011-2020. Dengan menambah variabel lain dalam penelitian yakni rasio ketergantungan daerah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

					d). APBD kesehatan berpengaruh positif terhadap IPM	
No	**Nama Peneliti**	**Judul Penelitian**	**Tujuan Penelitian**	**Metode penelitian**	**Kesimpulan**	**Perbedaan**
8	Eka Agustina et al.	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Produk Domestik Regional Bruto serta Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Timur	Menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap : a). PDRB b). Indeks Pembangunan Manusia	Kuantitatif, Analisis jalur (path analisis).	Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : a). Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PDRB dan IPM b). Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB, dan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap IPM	Penelitian dilakukan di Kabupaten Bangkalan periode 2011-2020. Dengan menambah variabel lain dalam penelitian yakni rasio ketergantungan daerah. Dan penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda
No	**Nama Peneliti**	**Judul Penelitian**	**Tujuan Penelitian**	**Metode penelitian**	**Kesimpulan**	**Perbedaan**
9	Anisa Fahmi	Pengaruh *Good Governance*, Belanja Fungsi Pendidikan dan Kesehatan, dan	Mengetahui pengaruh dari variabel berikut terhadap IPM, yakni variabel : a). *Good*	Kuantitatif, Metode OLS	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel good governance, belanja fungsi pendidikan dan	Penelitian dilakukan di Kabupaten Bangkalan periode 2011-2020. Dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	PDRB Per kapita terhadap IPM	*governance*, b). Belanja fungsi pendidikan, c). Belanja fungsi kesehatan d). PDRB per kapita		PDRB berpengaruh positif siginifikan terhadap IPM. Sementara belanja fungsi kesehatan berpengaruh negati dan signifikan terhadap IPM	menambah variabel lain dalam penelitian yakni rasio ketergantungan daerah

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode penelitian	Kesimpulan	Perbedaan
10	Muliza et al	Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan dan PDRB terhadap IPM di Provinsi Aceh	Melihat pengaruh variabel terhadap IPM Provinsi Aceh, di antaranya variabel : a). Belanja pemerintah (Pendidikan dan Kesehatan) b). Tingkat kemiskinan c). PDRB	Kuantitatif, Analisis regresi data panel	Dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa : a). Pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan b). Tingkat kemiskinan berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM c). PDRB berpengaruh positif dan signifikan	Penelitian dilakukan di Kabupaten Bangkalan periode 2011-2020. Dengan menambah variabel lain dalam penelitian yakni rasio ketergantungan daerah. Dan peneliti menggunakan analisis regresi linear berganda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori, referensi dari beberapa penelitian terdahulu serta pembahasan antara variabel bebas yakni rasio ketergantungan daerah, pengeluaran pemerintah terhadap variabel terikat yaitu indeks pembangunan manusia, maka kerangka konseptual dapat digambarkan sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

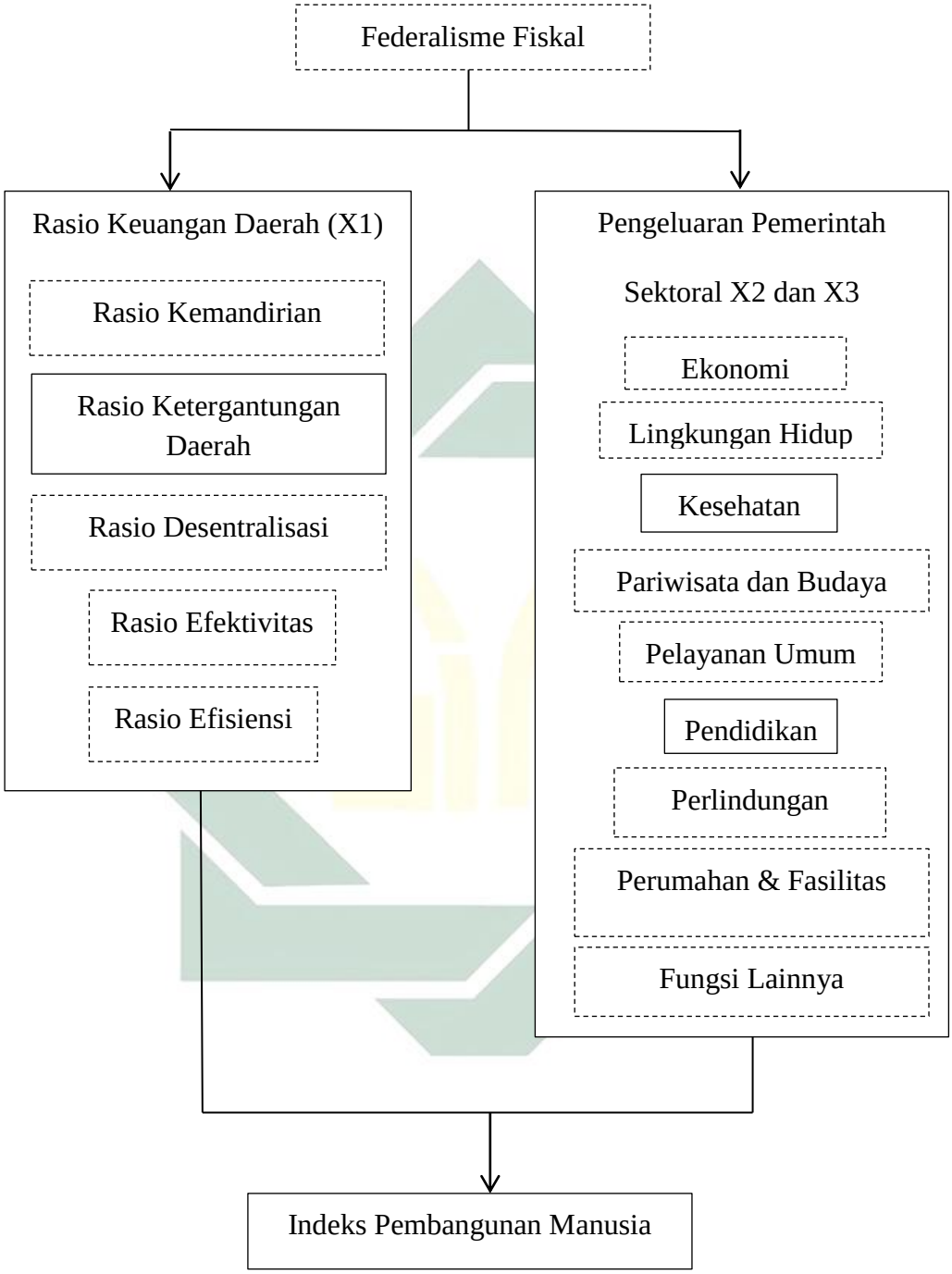

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

Keterangan : tidak diteliti/diamati

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan yang diharapkan, dan dugaan tersebut juga bisa benar atau salah. Berdasarkan rumusan masalah, teori diatas, dan alur pemikiran maka penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Variabel Rasio ketergantungan daerah diduga memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bangkalan.

H2 : Variabel Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan diduga memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bangkalan.

H3 : Variabel Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan diduga memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bangkalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjudul "Pengaruh Rasio Ketergantungan dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bangkalan Tahun 2011-2020" menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menekankan pada fenomena obyektif dan dikaji secara kuantitatif. Menurut Sukmadinata (2009), objektivitas penelitian kuantitatif dimaksimalkan melalui penggunaan angka, pemrosesan statistik, struktur, dan eksperimen terkontrol.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bangkalan yang artinya penelitian berada di Kabupaten Bangkalan. Salah satu lembaga yang digunakan untuk bahan referensi pengumpulan data adalah Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangkalan, Direktoral Jenderal Perimbangan Keuangan, literatur seperti jurnal sebagai acuan topik penelitian terkati. Waktu penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk observasi dimulai pada bulan April 2021, dengan menggunakan data sekunder tahun 2011-2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan konsep-konsep yang mempunyai variasi atau nilai yang berbeda. Konsep adalah fenomena abstrak yang dibentuk dengan menggenerelisasikan hal-hal yang konkrit.[19] Variabel penelitian terbagi dua yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Adapun dalam penelitian ini menggunakan beberapa variabel dianta lain :

1). Variabel Bebas (X1) : Rasio Ketergantungan Daerah

2). Variabel Bebas (X2) : Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

3). Variabel Bebas (X3) : Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan

4). Variabel Terikat (Y) : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

D. Definisi Operasional

Definisi operasional variabel didasarkan pada pendefinisian karakteristik yang dapat diamati dari hal-hal tertentu, atau konsep variabel diubah menjadi alat ukur. Variabel didefinisikan secara operasional untuk mempermudah dalam menentukan hubungan antar variabel dan pengukurannya.

1. Rasio Ketergantungan Daerah

   Rasio ketergantungan daerah adalah persentase dari total dana perimbangan yang diperoleh setiap pemerintah daerah dari pemerintah

[19] Agung Widhi Kurniawan and Zarah Puspitaningtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pusat terhadap total pendapatan daerah. Satuan yang digunakan ialah persentase (%) dari tahun anggaran 2011-2020.

2. Pengeluaran Pemerintah Daerah Sektor Pendidikan

   Pengeluaran pemerintah daerah sektor pendidikan merupakan anggaran pendidikan dari APBD untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bangkalan. Kisaran waktu yang diamati mulai dari tahun 2011-2020 dalam satuan rupiah.

3. Pengeluaran Pemerintah Daerah Sektor Kesehatan

   Pengeluaran pemerintah daerah sektor kesehatan adalah anggaran yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk perbaikan sarana dan prasarana masyarakat. Data yang dikumpulkan mulai dari periode 2011-2020.

4. Indeks Pembangunan Manusia

   IPM merupakan indeks komprehensif sebagai alat ukur kualitas hidup manusia di Kabupaten Bangkalan dari tahun 2011-2020, Hal tersebut dapat dilihat dari hasil yang didasarkan pada indeks pendidikan, indeks kesehatan dan daya beli masyarakat yang dinyatakan dalam persentase.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Data dan Sumber Data

1. Data

   Adapun pembagian data terbagi 2 yakni data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data berasal dari sumbernya langsung misalnya dengan wawancara atau kuesioner. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah dipublikasikan oleh pihak lain.[20] Dalam penelitian ini digunakan data sekunder, antara lain: data rasio ketergantungan, pengeluaran pemerintah serta IPM di Kabupeten Bangkalan dalam kurun waktu tahun 2011-2020.

2. Sumber Data

   Data yang diperoleh peneliti bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

F. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan studi pustaka sebagai metode pengumpulan data untuk penelitian ini. Studi kepustakaan memuat teori-teori yang sudah berkembang dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitian serta mengetahui hubungan antar variabel yang diteliti secara konseptual. Data

[20] Suharyadi and Purwanto, *Statistika Untuk Ekonomi Dan Keuangan Modern Edisi 2*, (Jakarta: Salemba empat, 2013), 13-14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, beserta literatur lainnya seperti jurnal akademik dan skripsi terkait penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Model analisis dengan metode kuantitatif menggunakan model regresi linier berganda. Untuk memeriksa pengaruh serentak maupun individu dari variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) menggunakan aplikasi Stata 13 dan Microsoft Excel untuk mempermudah proses analisis.

Kemudian dilakukan pengujian asumsi klasik untuk mengukur variabel. Adapun terdapat 4 uji asumsi klasik yakni : uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas dan autokorelasi. Selanjutnya dilakukan pengujian untuk uji t dan uji f.

1 Regresi Linier Berganda

Model Regresi merupakan penyederhanaan hubungan antara satu variabel dengan satu variabel atau lebih variabel lainnya. Hubungan diantara variabel terikat dan variabel bebas dalam analisis regresi bersifat sebab-akibat atau kausalitas. Model regresi terbagi menjadi dua jenis yakni regresi sederhana dan regresi berganda. Model regresi sederhana menunjukkan hubungan matematis antara variabel terikat dan variabel bebas. Sedangkan model regresi berganda menunjukkan hubungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

matematis antara variabel dependen dan beberapa variabel independen.[21] Variabel bebas yang digunakan ini adalah Rasio Ketergantungan Daerah (X1), Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (X2), Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (X3) dengan variabel terikat yaitu Indeks Pembangunan Manusia (Y). Model regresi linier berganda dijelaskan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta 1\ X1t + \beta 2\ X2t + \beta 3\ X3t + et$$

Dimana :

Y = Indek Pembangunan Manusia

X1 : Rasio Ketergantungan Daerah

X2 : Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

X3 : Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan

β : Koefisien regresi variabel bebas

α : Konstanta

e : Error

2 Uji Normalitas

Uji t signifikansi pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen akan valid apabila residual yang diperoleh terdistribusi normal. Tujuan dilakukan uji normalitas adalah untuk mengetahui model

[21] Anton Bawono and Ibnu Arya Fendha Shina, *Ekonometrika Terapan Untuk Ekonomi Dan Bisnis Islam Aplikasi Dengan Eviews, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Salatiga*, 2018, 17-18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

regresi yang didapatkan menunjukkan data terdistribusi normal atau sebaliknya. Model regresi harus terdistribusi normal atau mendekati normal.[22]

Untuk mendeteksi terjadinya pelanggaran atau tidak dalam uji normalitas, maka dalam STATA dapat dilakukan uji berikut :

a). Grafik plot untuk residual

b). Uji Shapiro-Wilk, Shapiro-Francia, dengan hipotesis:

H0: error terdistribusi normal

H1: error tidak terdistribusi normal

Dengan uji shapiro-wilk dan shapiro francia dapat diketahui bahwa data terdistribusi normal jika nilai Prob > α = 0,05

3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan kondisi dimana varians tidak konstan, dan akibat adalah varians menjadi bias sehingga uji signifikansi menjadi tidak valid.[23] Jika pada saat dilakukan uji Individual (uji t), setiap variabel independen tidak dapat memberi pengaruh signifikan terhadap variabel absolut residual maka hal tersebut mengindikasikan bahwa asumsi homogenitas varian terpenuhi.[24]

---

[22] Ansofino et al., *Buku Ajar Ekonometrika* , (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 22-23.
[23] Agus Tri Basuki, *Pengantar Ekonometrika (Dilengkapi Penggunaan Eviews)* , (Yogyakarta: Danisa Media, 2017), 63.
[24] Bawono and Shina, *Ekonometrika Terapan Untuk Ekonomi...*, 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini digunakan uji BrueschPagan/Cook-Weisberg test. Dengan dilakukan uji BrueschPagan/CookWeisberg ini dapat diketahui apakah terjadi masalah heteroskedastisitas atau tidak dengan melihat Probabilitas Chi2. Apabila Probabilitas Chi2 < α maka kesimpulannya adalah bahwa data tersebut terjangkit masalah heteroskedastisitas.

4 Uji Multikolinearitas

Regresi tidak mengasumsikan hubungan linier antara variabel independen. Multikolinearitas terjadi ketika ada hubungan linier yang kuat antara variabel bebas, multikolinearitas akan terjadi. Ketika multikolinearitas terdeteksi, maka nilai standard eror dan hasil uji t menjadi tidak valid.[25] Untuk uji multikolinearitas dalam penelitian ini dapat dilakukan uji VIF (Variance Inlatian Factor) dengan menggunakan software STATA 13.

Regresi yang terbebas dari multikolinearitas apabila diperoleh nilai VIF di sekitar 1 atau tolerance mendekati 1. Apabila nilai VIF variabel bebas menunjukkan nilai lebih dari 10, maka terdapat hubungan kolinearitas yang kuat antara variabel bebas.

[25] Dedi Rosadi, *EKONOMETRIKA & ANALISIS RUNTUN WAKTU TERAPAN DENGAN EVIEWS* , (Yogyakarta: ANDI, 2012), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5 Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan hubungan yang terjadi antara satu variabel pengganggu dengan variabel pengganggu lainnya. Pada saat yang sama, asumsi penting OLS tentang variabel pengganggu adalah bahwa tidak terdapat hubungan dari satu variabel pengganggu dengan variabel lainnya.[26] Untuk mengetahui adanya tanda autokorelasi dalam penelitian yang menggunakan STATA, dapat diuji dengan uji Breuch-Godfrey, dengan hipotesis :

H_0 : ada autokorelasi residual

H_1 : tidak ada autokorelasi residual

Dengan kriteria uji menerima H_0 apabila nilai prob. < α (0,05), sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa dalam data tersebut terdeteksi masalah autokorelasi

6 Uji Statistik

Untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen, maka dilakukan uji hipotesis parameter atau koefisien regresi. Ada dua pengujian, yakni uji simultan (uji f) dan uji parsial (uji t).

a). Uji Simultan (Uji f)

[26] Ansofino et al., *Buku Ajar Ekonometri..., 58*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Uji simultan juga disebut uji kecocokan model atau uji serentak. Parameter koefisien regresi diuji pada saat yang sama untuk menentukan bahwa variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara bersamaan. Maka diperlukan rumus statistik dibawah ini :

$$F = \frac{R^2/(k-1)}{1-R^2/(n-k)}$$

Keterangan:

R : Koefisien Korelasi Berganda

n : Jumlah Sampel

k : Jumlah komponen variabel bebas

Dari persamaan di atas, jika hipotesis nol terbukti, nilai R^2 akan menjadi nol, dan nilai f juga akan menjadi nol. Hasil f statistik yang tinggi tidak menerima hipotesis nol, dan nilai f statistik yang rendah akan menerima hipotesis nol. Untuk menguji apakah koefisien regresi ($\beta 1$dan $\beta 2$) mempengaruhi variabel terikat secara bersama-sama atau keseluruhan, langkah-langkah untuk uji F diantaranya adalah:[27]

1). Membuat hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternatif (Ha) sbb:

H0 : $\beta 1 = \beta 2 = \beta 3 = 0$

Menunjukkan bahwa variabel X1, X2, X3 tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y

[27] Basuki, Pengantar Ekonometrika..., 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ha : $\beta 1 \neq \beta 2 \neq \beta 3 \neq 0$

Menunjukkan bahwa variabel X1, X2, X3 berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y

2). Mengambil keputusan untuk menolak atau menerima H0 sbb:

Jika Prob. F hitung < α, maka H0 ditolak dan sebaliknya jika Prob. F hitung > α maka H0 diterima.

b). Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial digunakan untuk menguji apakah variabel independen ke-j berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji parsial ini dilakukan sesuai dengan banyaknya variabel bebas. Hipotesis untuk uji parasial ini sebagai berikut :[28]

$H_0 : \beta_j = 0$ (tidak ada pengaruh)

$H_1 : \beta_j \neq 0$ (ada pengaruh)

Statistik pengujian yang digunakan adalah :

$$t\ hitung = \frac{\beta j}{s(\beta j)}$$

Dimana :

β j = Koefisien regresi

S(β j) = Standar Error dari β

[28] Bawono dan Shina, *Ekonometrika Terapan untuk Ekonomi dan Bisnis...*, *23*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila nilai t hitung < t tabel, maka H_0 akan ditolak. Untuk itu dapat diambil kesimpulan bahwa variabel bebas ke-j tidak dapat berpengaruh signifikan terhadap variabel bebas.

7 Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk menentukan derajat kecocokan atau keakuratan garis yang dibentuk oleh sekumpulan data. Determinasi mewakili proporsi variasi total yang dijelaskan oleh model. Nilai R^2 yang semakin tinggi (mendekati 1), semakin tinggi akurasinya. Koefisien determinasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut :[29]

a). Nilai R^2 selalu positif :

$$R^2 = \frac{\sum(Y_1 - Y)^2}{\sum(Y_1 - Y)^2}$$

b). Nilai $0 \leq R^2 \leq 1$

1 $R^2 = 0$, menunjukkan bahwa hasil dari model regresi tidak sesuai untuk memperkirakan nilai variabel dependen, karena tidak terdapat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat.

2 $R^2 = 1$, berarti bahwa hasil dari model regresi dapat memperkirakan nilai variabel terikat dengan sempurna.

[29] Ibid., 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambar Umum Kondisi Daerah

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Bangkalan dengan luas 1.260,14 km^2 yang berada di bagian paling barat dari pulau Madura terletak pada posisi 112° 40’ 06’’ sampai 113° 08’ 44’’ Bujur Timur dan 6°51’39’’ sampai 7°11’39’’ Lintang Selatan dengan batas-batas Wilayah sebagai berikut :

a). Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa.

b). Sebelah Timur berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Sampang.

c). Sebelah Selatan dan Barat berbatasan dengan Selat Madura.

Gambar 4. 1 Peta Kabupaten Bangkalan

Sumber: www.bangkalankab.go.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara administrasi Kabupaten Bangkalan terdiri dari 18 wilayah kecamatan, yaitu: Kecamatan Kamal (41,40 km^2), Labang (35,23 km^2), Kwanyar (47,81 km^2), Modung (78,79 km^2), Blega (92,82 km^2), Konang (81,09 km^2), Galis (120,56 km^2), Tanah Merah (68,56 km^2), Tragah (39,58 km^2), Socah (53,82 km^2), Bangkalan (35,02 km^2), Burneh (66,10 km^2), Arosbaya (42,46 km^2), Geger (123,31 km^2), Kokop (125,75 km^2), Tanjung Bumi (67,49 km^2), Sepulu (73,25 km^2), dan Kecamatan Klampis (67,10 km^2).

Dilihat dari topografi, kabupaten Bangkalan berada pada ketinggian 2 – 100 m di atas permukaan laut. Wilayah yang terletak di pesisir pantai, antara lain, kecamatan Sepulu, Bangkalan, Socah, Kamal, Modung, Kwanyar, Arosbaya, Klampis, Tanjung Bumi, Labang, dan Kecamatan Burneh, mempunyai ketinggian 2-10 m di atas permukaan laut. Sedangkan wilayah yang terletak pada bagian tengah mempunyai ketinggian antara 19-100 m di atas permukaan air laut. Lokasi tertinggi terletak di kecamatan Geger dengan ketinggian 100m diatas permukaan laut.[30]

Secara hidrologis, wilayah Kabupaten Bangkalan terbelah atas beberapa sungai hingga mencapai 26 (dua puluh enam) arus sungai, di mana secara riil, arus sungai dimaksud mengalir dan mengairi beberapa

[30] Pemkab Bangkalan, "Gambaran umum kabupaten Bangkalan," last modified 2019, diakses Juli 2, 2021, http://www.bangkalankab.go.id/v6/site/gambaranumum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wilayah desa dan kecamatan di Kabupaten Bangkalan. Sungai terpanjang adalah sungai Kolpoh Kecamatan Kwanyar dengan panjang mencapai 16,15 Km.[31] Dikaitkan dengan karakter sungai, diketahui bahwa sebagian besar sungai-sungai dimaksud merupakan sungai tadah hujan yang dipengaruhi oleh perubahan iklim dalam tiap tahun, di mana pada musim kemarau, sebagian besar sungai mengalami kekeringan dan sebaliknya.

Obyek pariwisata di Kabupaten Bangkalan di tahun 2020 tercatat sebanyak 21 buah yang terdiri dari obyek wisata alam, hiburan, dan wisata religi. Jumlah wisatawan tahun 2020 mencapai lebih dari 961 ribu orang. Di antaranya hanya terdapat kurang dari 1 persen yang merupakan wisatawan mancanegara.

2. Demografis Penduduk

Penduduk Kabupaten Bangkalan tahun 2020 mencapai lebih dari 1 juta jiwa. Data tersebut merupakan hasil Sensus Penduduk yang dilakukan BPS pada bulan September 2020. Dibandingkan jumlah penduduk hasil sensus penduduk sebelumnya, Kabupaten Bangkalan mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 1,58 persen per tahunnya. Sementara itu

[31] "Profil Wilayah Kabupaten Bangkalan," diakses Juli 2, 2021, https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2020 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan adalah 97,2.[32]

Kepadatan penduduk di Kabupaten Bangkalan tahun 2020 mencapai 841 jiwa/km2, dengan kecamatan merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan tertinggi yang mencapai 12.462 jiwa/km2. Namun berdasarkan jumlah penduduknya, Kecamatan Galis merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak dengan 8,32 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Bangkalan.

Mayoritas penduduk di Kabupaten Bangkalan bekerja pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan yakni sebesar 55,9% dari jumlah penduduk keseluruhan. Selain didominasi oleh penduduk yang bekerja pada sektor pertanian, penduduk juga bekerja di bidang pertambangan, industri, listrik, konstruksi, jasa kemasyarakatan dan lain sebagainya.

3. Kondisi Rasio Ketergantungan Daerah

Rasio ketergantungan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana dari pemerintah pusat. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat

---

[32] BPS, "Bangkalan Dalam Angka 2021," diakses Juli 2, 2021, https://bangkalankab.bps.go.id/publication.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau provinsi. Rasio ketergantungan keuangan daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktivitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD, yang diukur dengan rasio antara PAD dengan total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan teori federalisme fiskal, bantuan dana dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk dapat menunjang masyarakat memperoleh kesejahteraan. Federalisme fiskal ini tercermin dalam bentuk otonomi daerah, dimana daerah mempunyai dua jenis pendapatan yakni pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan transfer. Jika jumlah pendapatan ini meningkat, maka tingkat kesejahteraan akan semakin tinggi. Sehingga pemerintah daerah dapat dikatakan mandiri dan mampu membiayai kegiatan pemerintahannya apabila kontribusi PAD mulai meningkat. Sedangkan kontribusi dana transfer yang besar terhadap total pendapatan, akan mengakibatkan daerah semakin ketergantungan. Ketergantungan daerah ini berdampak pada penurunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Tabel 4. 1 Rasio Ketergantungan Daerah

Kabupaten Bangkalan Tahun 2011-2020

Tahun	Rasio Ketergantungan	Kriteria
2011	71.69	Sangat Tinggi
2012	80.95	Sangat Tinggi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2013	79.62	Sangat Tinggi
2014	75.81	Sangat Tinggi
2015	70.49	Sangat Tinggi
2016	77.94	Sangat Tinggi
2017	71.90	Sangat Tinggi
2018	67.21	Sangat Tinggi
2019	66.48	Sangat Tinggi
2020	64.29	Sangat Tinggi

Sumber : data yang telah diolah dari DJPK

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata tingkat ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Bangkalan pada tahun 2011 hingga 2020 adalah sebesar 72,64% Sehingga diklasifikasikan menurut kriteria penilaian ketergantungan keuangan daerah adalah sangat tinggi. Terlebih lagi pada tahun 2012, rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Bangkalan mencapai 80,95%. Hal ini terjadi karena pada tahun tersebut penerimaan dana perimbangan mengalami kenaikan sebesar Rp 870.076.659.491. hal ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut ketergantungan pemerintah Kabupaten Bangkalan terhadap bantuan pemerintah pusat dalam hal ini dana perimbangan, sangat tinggi. Kemudian pada tahun 2017 hingga 2020 mulai mengalami penurunan dari 70,91% menjadi 64,29%. Pada empat tahun terakhir rasio ketergantungan menunjukkan tren yang positif dengan berkurangnya ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer, khususnya dari tahun 2017 hingga 2020. Namun berdasarkan hasil persentase tersebut ketergantungan keuangan daerah masih terbilang sangat tinggi. Dan tentunya dipengaruhi oleh kinerja PAD beserta sumber

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapatan lainnya yang masih kurang optimal untuk mendanai aktivitas pembangunan daerah, sehingga daerah masih bergantung terhadap dana transfer. Pemerintah Kabupaten Bangkalan dapat memberikan perhatian khusus untuk dapat memanfaatkan serta menggali sumber dan potensi yang ada di daerahnya.

4. Kondisi Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

Dalam upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan pendidikan nasional, selama beberapa tahun pemerintah telah mengeluarkan dana pembangunan untuk pendidikan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan UUD 1945 Amandemen IV Tahun 2002 telah mengamanatkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Investasi untuk pendidikan ini justru dibutuhkan oleh pemerintah untuk membangun sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi pengeluaran pemerintah untuk pendidikan ini merupakan bentuk nyata dari investasi untuk menaikkan produktivitas masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

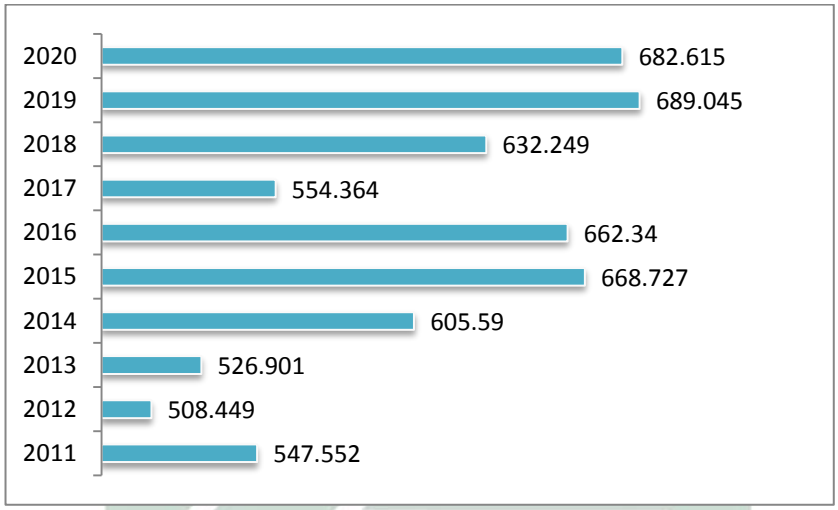

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, diolah

Gambar 4. 2 Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan 2011-2020 (dalam miliar rupiah)

Berdasarkan Gambar 4.2 menunjukkan rata-rata alokasi pengeluaran pemerintah untuk pendidikan di Kabupaten Bangkalan cenderung fluktuatif, meskipun relatif fluktuatif namun menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Rata-rata belanja urusan pendidikan tertinggi yakni pada tahun 2019 sebesar Rp 689,045 Miliar. Sedangkan rata-rata belanja urusan pendidikan terendah terjadi pada tahun 2012 yakni sebesar Rp 508,449 Miliar. Dengan adanya alokasi anggaran pemerintah sektor pendidikan diharapkan dapat meningkatkan IPM Kabupaten Bangkalan. Adanya peran pemerintah dalam melakukan pengeluaran sektor pendidikan juga diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat dalam memenuhi pendidikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anggaran pendidikan mulai terjadi peningkatan di tahun 2018 hingga 2020, penambahan anggaran ini dilakukan karena ada program pemberian insentif bagi guru ngaji dan madin. Program tersebut merupakan realisasi dari visi dan misi pemerintah Kabupaten Bangkalan. Insentif bagi guru ngaji dan madin ini terprogram dalam APBD perubahan Bangkalan 2018. Penambahan anggaran di bidang pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bangkalan. Salah satunya adalah pendidikan karakter yang selama ini selalu ditanamkan oleh guru ngaji dan madrasah diniyah. Pada tahun 2017 APBD Kabupaten Bangkalan mengalami penurunan sehingga mengakibatkan anggaran untuk pendidikan juga ikut menurun dari yang sebelumnya Rp 662.34 miliar (2016) mejadi Rp 554.364 miliar (2017). Selain itu terjadi pemangkasan anggaran dari pemerintah sehingga anggaran untuk pendidikan mengalami penyusutan. Dan semenjak tahun 2017 pemprov memberikan tanggung jawab untuk melaksanakan ujian sekolah secara mandiri untuk setiap daerah. Artinya anggaran untuk ujian nasional tidak menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, beralih menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

5. Kondisi Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan

Dalam UUD No. 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan yang telah disebutkan sebagai "*mandatory spending*" alokasi anggaran untuk sektor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesehatan adalah minimum sebesar 5% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta 10% dari Anggaran Pendidikan dan Belanja Daerah (APBD). Mandat ini sudah diterapkan oleh pemerintah sebagai acuan dalam menetapkan anggaran kesehatan yang berfokus untuk memenuhi kewajiban pembiayaan 5% dari APBN pada tingkat pusat dan 10% dari APBD untuk tingkat daerah. World Bank (2019) dalam literaturnya mengedepankan tiga pilar utama dalam pembiayaan kesehatan yaitu aspek kecukupan (*sufficiency*), pengalokasian anggaran yang efisien dan efektif (*efficiency and effecivenes*), dan keberlanjutan pembiayaan kesehatan (*sustainability*).

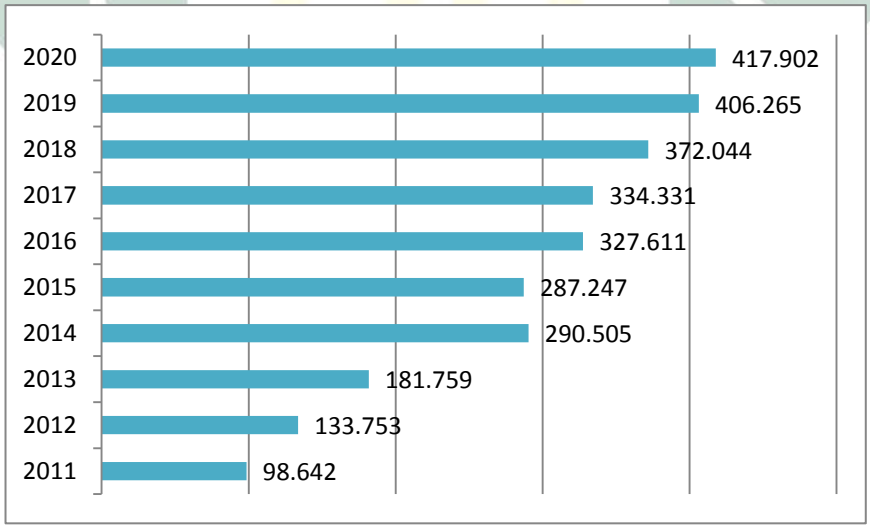

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, diolah

Gambar 4. 3 Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan 2011-2020 (dalam miliar rupiah)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan Gambar 4.3 menunjukkan rata-rata alokasi pengeluaran pemerintah untuk kesehatan mengalami perkembangan yang positif, di mana alokasi pengeluaran sektor kesehatan selalu meningkat selama tahun 2011 hingga 2020. Pada tahun 2011 pengeluaran sebesar Rp 98.642 miliar, sampai tahun 2020 pengeluaran pemerintah meningkat menjadi Rp 417.902 miliar. Dengan Adanya peran pemerintah dalam melakukan pengeluaran untuk sektor kesehatan diharapkan dapat mempermudah akses dalam mendapatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bangkalan masih berupaya untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat baik yang berada di daerah kota atau pelosok. Di Bangkalan terdapat 2 unit rumah sakit, kurangnya jumlah ruma sakit ini mewajibkan pemerintah menyedaiakan fasilitas lain yakni puskesmas demi mempermudah masyarakat memperoleh fasilitas kesehatan di daerah. Adapun jumlah puskesmas yakni 22 unit sementara jumlah puskesmas pembantu adalah 69 unit. Selain itu juga terdapat puskesmas keliling yang jumlahnya adalah 24 ununit., adanya fasilitas kesehatan ini akan dapat mempermudah pemerintah menjangkau masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Jumlah penduduk yang terus menerus meningkat setiap tahunnya ini perlu diimbangi dengan peningkatan fasilitas kesehatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain sarana yang cukup memadai, juga perlu diimbangi dengan tenaga kesehatan yang juga memadai.

6. Kondisi Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Badan Pusat Statistik, IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH). Pengetahuan diukur melalui indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan lama sekolah didefinisiakn sebagai lamanya sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu. Sedangkan standar hidup layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Untuk melihat tingkat keberhasilan pembangunan, IPM digolongkan menjadi beberapa kriteria, yakni rendah apabila tingkat IPM di bawah 60, sedang apabila berada di antara angka 60-70, tinggi apabila mencapai angka 70-80, dan sangat tinggi apabila berada di atas angka 80. Berikut adalah gambar grafik IPM Kabupaten Bangkalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

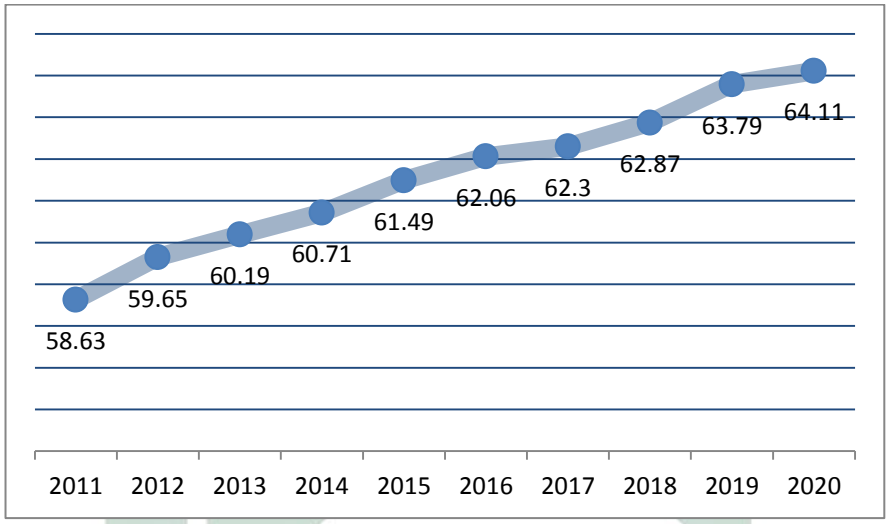

Sumber : BPS, Kabupaten Bangkalan (diolah)

Gambar 4. 4 Grafik IPM Kabupaten Bangkalan Tahun 2011-2020

Berdasarkan grafik di atas, nilai IPM tertinggi di Kabupaten Bangkalan yakni 64,11 pada tahun 2020. Sementara nilai IPM terendah yakni 58,63 pada tahun 2011. Perkembangan IPM Kabupaten Bangkalan semakin baik dari tahun ke tahun. Terlihat dari skor IPM tahun 2011-2020 terus mengalami peningkatan. Kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini mencerminkan bahwa kualitas pendidikan, kesehatan, standar hidup masyarakat Bangkalan juga mengalami peningkatan tiap tahunnya. Namun meski mengalami peningkatan, perkembangan IPM Kabupaten Bangkalan cenderung lamban. Selama 10 tahun terakhir pertumbuhan IPM Kabupaten Bangkalan bahkan tidak melebihi 1 persen.

Hasil capaian IPM tahun 2020 sebesar 64,11 menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Bangkalan masih tergolong kategori sedang dan masih belum mampu mengejar ketertinggalan dari kabupaten lainnya yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berada di Provinsi Jawa Timur. Rendahnya IPM Kabupaten Bangkalan ini diakibatkan oleh rendahnya kualitas pendidikan, yaitu rata-rata lama sekolah yang masih rendah. Masyarakat Kabupaten Bangkalan mayoritas hanya menamatkan pendidikan hingga jenjang sekolah dasar. Selain itu juga terjadi disparitas pembangunan di Kabupaten Bangkalan yang masih tinggi. Untuk daerah terpencil masih memperlihatkan kondisi yang memperihatinkan karena kurangnya tempat pendidikan, tempat pelayanan, dan tidak adanya perbaikan jalan serta fasilitas jalan. Sebab adanya disparitas ini kesejahteraan pembangunan di Kabupaten Bangkalan masih belum merata. Untuk itu pemerintah Kabupaten Bangkalan harus memerhatikan kondisi IPM dan melakukan perbaikan peringkat dengan meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat baik di daerah pinggiran kota dan di daerah terpencil.

B. Analisis Data

1. Regresi Linier Berganda

   Dalam penelitian ini, pengaruh rasio ketergantungan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bangkalan akan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda menggunakan alat bantu Stata 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4. 2 Hasil Uji Statistik

```
. regress Y  X1 X2 X3

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      10
-------------+------------------------------           F(  3,     6) =   39.51
       Model |  27.4338487     3  9.14461624           Prob > F      =  0.0002
    Residual |  1.38855129     6  .231425215           R-squared     =  0.9518
-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.9277
       Total |     28.8224     9  3.20248889           Root MSE      =  .48107

------------------------------------------------------------------------------
           Y |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
          X1 |  -2.932525   3.945645    -0.74   0.485    -12.58717     6.72212
          X2 |  -.0016825   .0042191    -0.40   0.704    -.0120062    .0086413
          X3 |   .0153826   .0025998     5.92   0.001     .0090211    .0217441
       _cons |   60.35552   4.277243    14.11   0.000     49.88948    70.82155
------------------------------------------------------------------------------
```

Sumber : hasil olahan stata 13

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.1 diperoleh konstanta regresi sebesar 60,35552, koefisien regresi variabel rasio ketergantungan sebesar -2,932525, koefisien regresi variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan sebesar -0,0016825 dan koefisien regresi variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan sebesar 0,0153826. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, maka diperoleh persamaan regresi antara variabel rasio ketergantungan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia sebagai berikut:

Y = 60,35552-2,932525X1-0,0016825X2+0,0153826X3

Dengan :

Y = Indeks Pembangunan Manusia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

X1 = Rasio Ketergantungan

X2 = Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

X3 = Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan

2. Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini menggunakan data sekunder, sehingga untuk memenuhi standar analisis data yang perlu dilakukan adalah mengaplikasikan beberapa uji asumsi klasik.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji model regresi variabel-variabel berdistribusi normal atau tidak. Untuk uji data formalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Shapiro-Francia dan Uji Grafik. Untuk uji Shapiro-Francia dapat dilihat dari nilai probabilitas masing-masing variabel. Jika nilai dari probabilitas > 0,05, maka dapat dikatakan lolos uji asumsi normalitas dan sebaliknya jika nilai probabilitas < 0,05 dapat dikatakan data tidak berdistribusi normal. Berikut hasil pengujian dengan Shapiro-Francia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4. 3 Hasil Uji Shapiro-Francia

```
. sfrancia Y X1 X2 X3

                 Shapiro-Francia W' test for normal data

    Variable |     Obs       W'          V'         z       Prob>z
-------------+-------------------------------------------------------
           Y |      10    0.98641       0.227    -2.575    0.99498
          X1 |      10    0.96670       0.557    -1.016    0.84527
          X2 |      10    0.92473       1.260     0.401    0.34407
          X3 |      10    0.93118       1.152     0.246    0.40295
```

Dengan menggunakan uji ini diperoleh hasil analisis bahwa semua variabel berasal dari data yang berdistribusi normal. Dapat dilihat berdasarkan nilai probabilitas masing-masing variabel dengan menggunakan uji Shapiro Francia, bahwa semua nilai probabilitas variabel x1, x2 dan x3 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data memenuhi asumsi normalitas. Untuk memperkuat hasil pengujian di atas, maka dilakukan juga pengujian normalitas dengan menggunakan Grafik.

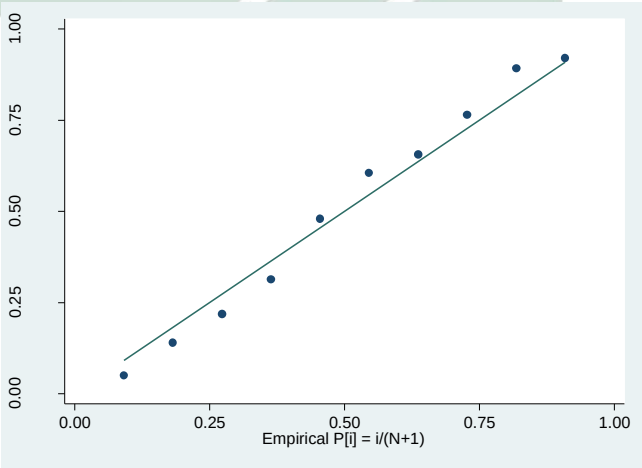

Gambar 4. 5 Hasil Uji Grafik Indeks Pembangunan Manusia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hasil uji formalitas pada variabel indeks pembangunan manusia yang ditunjukkan oleh grafik Gambar 4.2, dapat diketahui bahwa variabel indeks pembagnunan manusia telah memiliki persebaran data yang normal karena persebaran data pada titik-titik di atas telah tersebar mengikuti garis normalnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel IPM telah memenuhi asumsi normalitas.

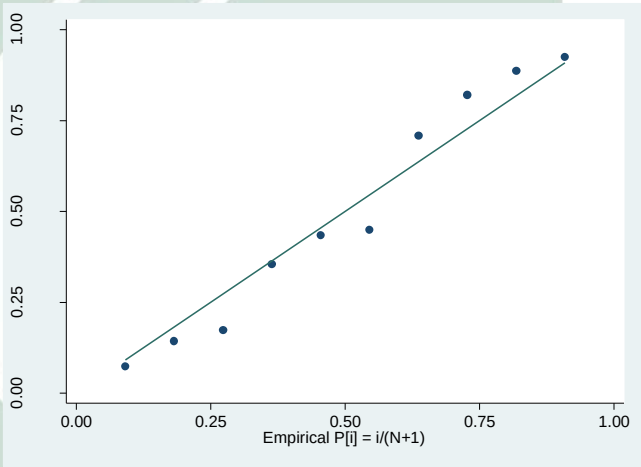

Gambar 4. 6 Hasil Uji Grafik Rasio Ketergantungan

Gambar 4.5 di atas menunjukkan bahwa variabel rasio ketergantungan telah memiliki persebaran data yang normal karena persebaran data pada titik-titik di atas telah tersebar mengikuti garis normalnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel rasio ketergantungan telah memenuhi asumsi normalitas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

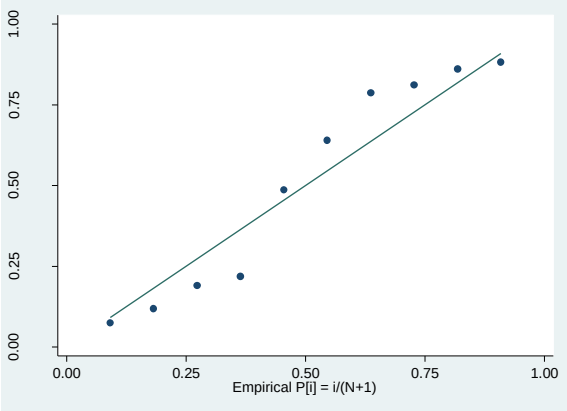

Gambar 4. 7 Hasil Uji Grafik Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

Berdasarkan hasil uji formalitas pada variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan telah memiliki persebaran data yang normal karena persebaran data pada titik-titik di atas telah tersebar mengikuti garis normalnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah memenuhi asumsi normalitas.

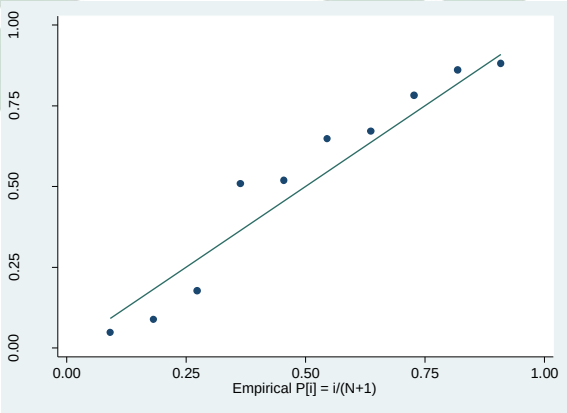

Gambar 4. 8 Hasil Uji Grafik Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 4.5 di atas menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah telah memiliki persebaran data yang normal karena persebaran data pada titik-titik di atas telah tersebar mengikuti garis normalnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan telah memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat hubungan linier yang kuat antara variabel independen. Adanya multikolinearitas dalam penelitian ini dapat dilihat melalui uji VIF (Variance Inflatian Factor). Berikut hasil pengujian multikolinearitas berdasarkan uji *VIF*.

Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinearitas (VIF)

```
. vif
```

Variable	VIF	1/VIF
X3	3.29	0.303772
X2	3.27	0.305946
X1	2.01	0.497052
Mean VIF	2.86	

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui nilai VIF untuk masing-masing variabel penelitian dan juga nilai mean VIF untuk seluruh variabel yang digunakan. Dalam pengujian VIF, suatu variabel yang terdekteksi multikolinearitas apabila hasil uji VIF menunjukkan angka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih besar dari 10. Sedangkan hasil pengujian multikolinearitas pada tabel di atas sudah terbebas dari gejala multikolinearitas karena memiliki nilai VIF yang tidak lebih besar dari 10.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah tedapat gejala heteroskedastisitas dalam model penelitian ini. Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan BreuschPagan / Cook-Weisberg test. Pada pengujian ini dapat diketahui ada atau tidaknya permasalahan heteroskedastisitas dengan melihat Prob. Chi^2. Jika Prob $Chi^2 < \alpha$ (atau Chi^2 stat > Chi^2 tabel) maka dapat disimpulkan terdapat masalah heteroskedastisitas. Berikut hasil pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

```
. estat hettest

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity
         Ho: Constant variance
         Variables: fitted values of Y

         chi2(1)      =     0.06
         Prob > chi2  =   0.8022
```

Sumber : Data diolah dengan STATA 13, 2021

Gambar 4. 9 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada gambar di atas, diketahui bahwa nilai probabilitas Chi^2 adalah 0,8022 yang lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini telah terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi berfungsi untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan pada asumsi klasik. Autokorelasi merupakan korelasi antara satu variabel gangguan dengan variabel gangguan lainnya. Pada saat yang sama, salah satu asumsi penting OLS tentang variabel gangguan adalah bahwa tidak ada hubungan antara satu variabel gangguan dengan variabel gangguan lainnya.[33] Metode pengujian yang digunakan yaitu uji Breusch-Godfrey. Adapun hasil dari pengujian ini terkait autokorelasi sebagai berikut :

Tabel 4. 5 Hasil Uji Autokorelasi (B-Godfray)

Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation

lags(*p*)	chi2	df	Prob > chi2
1	0.029	1	0.8646

H0: no serial correlation

Sumber : Hasil Olah Data STATA 2021

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji Breusch-Godfrey menunjukkan bahwa model terbebas dari autokorelasi. Hal ini ditunjukkan pada hasil probabilitas sebesar 0,8545, nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Artinya dalam uji tersebut data memenuhi asumsi bahwa tidak terdeteksi autokorelasi.

[33] Ansofino et al., *Buku Ajar Ekonometri..., 58*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Uji Statistik

a). Uji Statistik F (Simultan)

Uji statistik F digunakan untuk mengukur apakah semua variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel terikat. Dengan taraf signifikansi 0,05, jika nilai probabilitas hasil uji F>>0,05 maka variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Jika nilai probabilitas hasil uji F<0,05, maka variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat.

Tabel 4. 6 Hasil Uji Simultan (Uji F)

Source	SS	df	MS
Model	27.4338487	3	9.14461624
Residual	1.38855129	6	.231425215
Total	28.8224	9	3.20248889

Number of obs	=	10
F(3, 6)	=	39.51
Prob > F	=	0.0002
R-squared	=	0.9518
Adj R-squared	=	0.9277
Root MSE	=	.48107

Sumber : Data diolah dengan STATA, 2021

Berdasarkan hasil di atas, terlihat bahwa hasil uji F (simultan) menunjukkan nilai signifikansi 0,0002 yang lebih kecil dari 0,05. Dapat juga dilihat dari besarnya F-stat yakni 39,51 dengan k=3 dan df=6 maka didapat nilai pada F-tabel 4,76, yang berarti nilai F-stat > dibandingkan dengan F-tabel. Hasil uji F ini menunjukkan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu IPM.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b). Uji Statistik T (Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial atau masing-masing terhadap variabel dependen. Jika nilai prob. T statistik > 0,05 berarti variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai prob t statistik < 0,05, maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 4. 7 Hasil Uji Statistik T (Parsial)

Y	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
X1	-.0293253	.0394564	-0.74	0.485	-.1258717	.0672212
X2	-.0016825	.0042191	-0.40	0.704	-.0120062	.0086413
X3	.0153826	.0025998	5.92	0.001	.0090211	.0217441
_cons	60.35552	4.277243	14.11	0.000	49.88948	70.82155

Sumber : Data diolah dengan STATA, 2021

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa variabel rasio ketergantungan dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh negatif terhadap IPM namun tidak signifikan. Sementara variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Kabupaten Bangkalan.

Pertama rasio ketergantungan (X1), menunjukkan bahwa variabel rasio ketergantungan memiliki nilai probabilitas 0,485 (lebih besar dari 0,05) dan nilai t-statistik -0,74 (lebih kecil dari t-tabel 2,447) dengan nilai signifikansi 5% maka secara individu variabel rasio

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketergantungan tidak berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan negatif terhadap IPM kabupaten Bangkalan. Artinya meningkatnya rasio ketergantungan akan menyebabkan penurunan IPM kabupaten Bangkalan.

Kedua pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X2), menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan memiliki nilai probabilitas 0,704 (lebih besar dari 0,05) dan nilai t-statistik -0,40 (lebih kecil dari t-tabel 2,447) dengan nilai signifikansi 5% maka secara individu variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan tidak berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan negatif terhadap IPM kabupaten Bangkalan. Artinya meningkatnya pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan akan menyebabkan penurunan IPM kabupaten Bangkalan.

Ketiga pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X3), menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan memiliki nilai probabilitas 0,001 (lebih kecil dari 0,05) dan nilai t-statistik 5,92 (lebih besar dari t-tabel 2,447) dengan nilai signifikansi 5% maka secara individu variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap IPM kabupaten Bangkalan. Artinya meningkatnya pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan akan meningkatkan nilai IPM kabupaten Bangkalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Analisis Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi menggambarkan proporsi variasi total yang dapat dijelaskan oleh model. Semakin tinggi nilai R2 (mendekati 1), maka semakin tinggi akurasinya. Berdasarkan tabel 4.5 di atas, dari hasil pengujian diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) yang dilihat dari R-Square sebesar 0.9518, maka sekumpulan variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat sebesar 95% atau dengan kata lain variabel independen rasio ketergantungan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan, mampu menjelaskan variabel IPM sebesar 95% sedangkan sisanya 5% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pengaruh Variabel Bebas Secara Simultan terhadap Variabel Terikat

Dari hasil pengujian, penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yaitu rasio ketergantungan (X1), pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X2) dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X3) berpengaruh secara simultan atau secara bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu Indeks Pembangunan Manusia (Y). Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil pengujian nilai F hitung sebesar 39,51 dengan probabilitas variabel rasio ketergantungan (X1), pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X2) dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X3) sebesar 0,0002 sehingga lebih kecil dari pada nilai signifikansi sebesar 0,05 (5%) sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa secara simultan semua variabel independen diantaranya rasio ketergantungan (X1), pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X2) dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X3) berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu Indeks Pembangunan Manusia (Y).

Pembangunan manusia berarti perubahan positif pada manusia seutuhnya, fokus pada masyarakat dan kesejahteraannya, dan menjadi tujuan akhir dari segala macam pembangunan. Menurut Amartya Sen, pembangunan manusia adalah sebagai perluasan kebebasan nyata yang dinikmati oleh manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebebasan bergantung pada faktor sosial ekonomi seperti akses ke pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan peluang politik. Mahbub ul Haq, memiliki pandangan yang sama bahwa pembangunan manusia adalah proses perluasan kesempatan untuk kebebasan politik, partisipasi dalam kehidupan publik, kesempatan pendidikan, kelangsungan hidup dan kesehatan, dan menikmati standar hidup yang layak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Baeti (2013), yang menyatakan bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan secara simultan berpengaruh terhadap IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Hal itu juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Eka & Haryadi (2016), yang menyatakan bahwa variabel derajat desentralisasi, ketergantungan daerah dan efektivitas PAD berpengaruh secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Nadia Ayu (2012), juga menyatakan bahwa variabel PDRB, rasio ketergantungan, APBD pendidikan dan APBD kesehatan berpengaruh secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

B. Pengaruh Variabel Bebas Secara Parsial terhadap Variabel Terikat

1. Pengaruh Rasio Ketergantungan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bangkalan Tahun 2011-2020

   Hasil pengujian data menggunakan STATA 13, menunjukkan bahwa hasil t hitung dari variabel rasio ketergantungan (X1) adalah sebesar -0,74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan nilai probabilitas 0,485 atau menerima H_0 dan menolak H_1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial, variabel rasio ketergantungan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM di Kabupaten Bangkalan. Adapun nilai koefisien model regresi dari variabel rasio ketergantungan yaitu sebesar -0,29 yang berarti, apabila rasio ketergantungan naik sebesar satu satuan maka IPM akan meningkat sebesar -0,29. Hal ini tentu tidak sesuai dengan hipotesis dalam penelitian ini, yang menyatakan bahwa rasio ketergantungan daerah secara langsung berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio ketergantungan daerah tidak memberikan pengaruh terhadap pembangunan manusia di Kabupaten Bangkalan. Hal ini disebabkan Kabupaten Bangkalan masih memperlihatkan kondisi keuangan yang belum baik dan belum bisa dianggap mandiri. Oleh karena itu kondisi keuangan daerah tidak mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berdampak pada pembangunan manusia di Kabupaten Bangkalan. Hal lain juga disebabkan pemerintah kabupaten Bangkalan belum bisa menjadikan PAD menjadi sumber pendapatan utama, sementara peran dana transfer atau dana perimbangan dari pemerintah pusat seharusnya menjadi sumber penerimaan tambahan yang tidak memiliki peran dominan. Ketergantungan keuangan daerah ini juga dikarenakan kontribusi PAD yang begitu kecil terhadap total pendapatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 5. 1 Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011-2020

Tahun	PAD	Total Pendapatan	Kontribusi (%)
2011	44.017.017.389,00	1,029,923,998,151.00	4,27
2012	62.836.209.595,00	1,074,890,410,689.00	5,85
2013	83.249.442.447,00	1,261,261,677,362.00	6,60
2014	101.110.823.868,00	1,417,354,001,292.00	7,13
2015	122.079.312.247,00	1,614,127,547,629.00	7,56
2016	165.985.223.861,00	2,042,254,338,524.00	8,13
2017	191.264.289.113,00	2,029,124,851,047.00	9,43
2018	207.660.709.800,00	2,070,154,832,021.00	10,03
2019	215.936.752.097,00	2,308,657,046,484.00	9,35
2020	261.801.099.144,36	2,300,127,918,039.36	11,38

Sumber : DJPK, (diolah).

Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah di Provinsi Bangkalan masih relatif sangat rendah. Rendahnya kontribusi PAD ini adalah karena pemerintah kurang fokus dalam melakukan upaya untuk meningkatkan PAD. Selain itu juga disebabkan pemerintah daerah mendapatkan bantuan dana yang jumlahnya lebih besar dibandingkan PAD Kabupaten Bangkalan. Jika dilihat tahun 2020, nilai PAD masih sangat minim yakni sebesar Rp 261.801,099.144,36 sementara dana yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp 557.846.785.928,00. Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk mendanai keuangan daerahnya saja,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah Kabupaten Bangkalan masih bergantung terhadap bantuan dana dari pemerintah pusat. Untuk itu pemerintah Kabupaten Bangkalan harus terus berupaya mengembangkan potensi PAD sehingga dapat memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah. Dengan tujuan supaya Kabupaten Bangkalan dapat menjadi lebih maju dan mendiri dalam membiayai .penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk memperkuat sumber penerimaan serta optimalisasi PAD, pemerintah daerah dapat melakukan upaya penggalian sumber daya alam yang baru. Selain itu juga dapat menggali potensi pariwisata dan budaya lokal untuk menarik wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri. Identifikasi sektor unggulan terhadap potensi daerah perlu untuk digali dan dikembangkan secara konsisten sebagai sumber PAD potensial, misalnya sektor pariwisata, pertambangan, pertanian, perikanan, dan perdagangan. Ada beberapa alternatif yang dapat diupayakan, seperti mendorong pertumbuhan UMKM yang disesuaikan dengan potensi daerah, kemudian pemerintah pusat dapat melakukan kegiatan ekspor komoditas unggulan serta menggenjot performa BUMD potensial.

Berdasarkan teori federalisme fiskal, Untuk dapat mengaplikasikan program desentralisasi fiskal ini, maka setiap daerah diwajibkan menyediakan dana untuk biaya pembangunannya sendiri. Sistem federalisme dan fiskal memiliki hubungan yang berdampak pada bentuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Dan dengan adanya bantuan dana transfer dari pemerintah pusat akan menjadi sumber pendapatan yang sangat penting bagi pemerintah daerah. Jika pemerintah daerah berhasil menjalankan pemerintahannya dengan baik maka akan berdampak pada petumbuhan ekonomi. Dan hal ini juga tentu akan memberi dampak terhadap kualitas manusia atau masyarakat di daerah tersebut. Namun apabila daerah tersebut belum mampu untuk menerapkan desentralisasi fiskal maka akan mengakibatkan kemunduran dalam pembangunan ekonomi. Implikasi dari penelitian ini adalah jika pemerintah dapat mengelola keuangan daerahnya sendiri dan tidak dominan bergantung terhadap dana transfer pemerintah pusat maka akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan itu akan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bangkalan.

Hal itu didukung oleh penelitian yang dilakukan Eka dan Haryadi (2016) mengenai pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap indeks pembangunan manusia, yang menyatakan bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap IPM. Rasio ketergantungan keuangan yang tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat tidak akan berpengaruh terhadap pengadaan layanan publik, karena pendapatan transfer digunakan untuk menutup pos belanja tidak langsung yang tidak mampu dipenuhi hanya dengan PAD. Jika pengadaan pelayanan publik tidak terpengaruh, begitupun dengan Indeks

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembangunan Manusia. IPM yang diukur dari pengadaan layanan publik juga tidak akan terpengaruh oleh pendapatan transfer.

Studi lain yang juga mendukung hasil penelitian ini yakni penelitian yang dilakukan oleh Riva Ubar Harahap (2011) mengenai Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa variabel DAU tidak berpengaruh terhadap IPM, karena variabel DAU tersebut lebih sering digunakan untuk belanja umum pegawai atau fasilitas umum dan bukan untuk infrastruktur sehingga pengaruhnya terhadap IPM cenderung sedikit. Variabel DAK juga tidak berpengaruh terhadap IPM karena dalam penelitian ini tidak memisahkan alokasi DAK berdasarkan tiap-tiap bidang dan tidak mengetahui sarana dan prasarana yang dibangun oleh pemerintah dengan menggunakan DAK untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bangkalan Tahun 2011-2020

Berdasarkan hasil pengolahan uji data menggunakan STATA 13, diketahui bahwa nilai t hitung variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X2) yaitu sebesar -0,40 dengan nilai probabilitas 0,704. Hal itu menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel pengeluaran pemerintah sektor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap IPM di Kabupaten Bangkalan. Sementara dilihat dari persamaan model regresi, nilai koefisien dari variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan adalah sebesar -0,001 yang berarti bahwa apabila pengeluaran pemerintah sektor pendidikan naik sebesar satu satuan, maka IPM di Kabupaten Bangkalan akan meningkat sebesar -0,001. Hal ini tentu tidak sesuai dengan hipotesis pada penelitian ini, yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan secara langsung berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

Dari hasil estimasi menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan tidak berpengaruh terhadap Indeks pembangunan manusia. Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan masih belum mampu memberikan kontribusi terhadap kinerja perekonomian daerah dan perbaikan kesejahteraan masyarakat di kabupaten Bangkalan. Hal ini terjadi karena masyarakat masih belum dapat menikmati pendidikan dengan baik. Disebabkan belum meratanya pendidik dan tenaga kependidikan serta kualitas pendidik yang berada di daerah pelosok serta pinggiran kota. Selain itu, fasilitas pendidikan juga masih belum merata di daerah terpencil.

Indikator untuk melihat akses penduduk terhadap fasilitas pendidikan ini dapat dilihat menggunakan angka partisipasi sekolah (APS). Nilai APS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tinggi dapat mencerminkan jumlah penduduk yang dapat menikmati bangku sekolah. APS Bangkalan pada tahun 2020 untuk kelompok usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun tercatat diatas 90 persen, dan untuk jenjang usia SD hampir mendekati angka 100 persen (99,48 persen), artinya rata-rata seluruh anak usia 7 hingga 12 tahun bersekolah SD. Begitu juga dengan kelompok usia 13 hingga 15 tahun mencapai 92,37 persen, dapat digambarkan bahwa program wajib belajar 9 tahun telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Dan untuk kelompok usia 16 hingga 18 tahun, APS berada pada 50,47 persen. Terdapat banyak faktor yang mengakibatkan capaian APS pada sekolah tingkat lanjutan lebih rendah dibandingkan sekolah tingkat pertama. Diantaranya adalah faktor ketersediaan fasilitas dan budaya. Berikut dibawah ini merupakan capaian APS Kabupaten Bangkalan selama 6 tahun terakhir

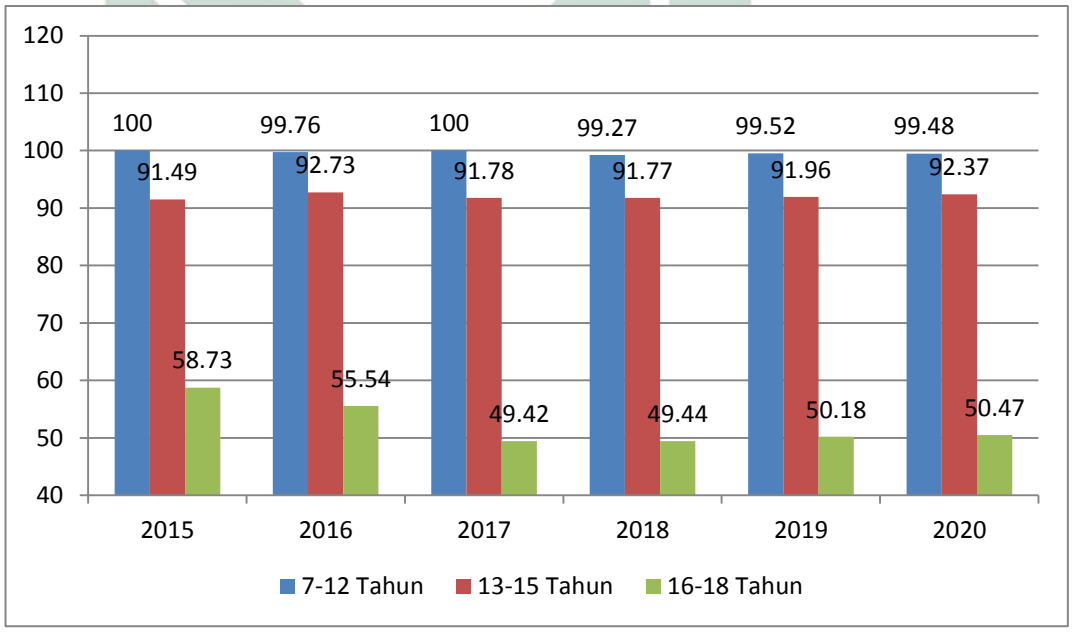

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 5. 1 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur

Untuk dapat melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi dari wajib belajar 9 tahun ini perlu diimbangi dengan adanya sekolah tingkat lanjutan dan dapat diakses. Dan juga harus ada dukungan dari masyarakat setempat atau budaya. Seperti budaya menikah di usia muda yang dapat menghambat anak-anak untuk dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Sebagian dari pengeluaran pemerintah sektor pendidikan cenderung hanya berfokus pada daerah perkotaan sehingga sangat sedikit menyentuh masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpelosok.

Dengan adanya perbaikan pada sistem pendidikan dan infrastruktur serta kesadaran dari masyarakat setempat akan pentingnya pendidikan. Maka akan dapat memperbaiki kualitas sumber daya manusia sehingga mampu mendorong indeks pembangunan manusia menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Meski biaya pendidikan sudah gratis namun ada masalah lainnya yang muncul seperti biaya transportasi anak dari jarak rumah yang jauh ke sekolah dianggap memberatkan. Oleh karena itu, di tingkat sekolah SMA/SMK sebaiknya dibangunkan sebuah asrama. Diharapkan dengan dibangunnya sebuah asrama, maka akan mengurangi angka anak-anak yang putus sekolah.

Berdasarkan teori federalisme fiskal, Untuk dapat mengaplikasikan program desentralisasi fiskal ini, maka setiap daerah diwajibkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyediakan dana untuk biaya pembangunannya sendiri. Pemerintah daerah diwajibkan menyediakan pelayanan publik yang lebih baik serta dapat menggali potensi daerahnya sendiri. Jika pemerintah dapat menjalankan pemerintahan daerahnya dengan baik maka akan berdampak pada laju perekonomian yang meningkat. Dan hal itu juga akan berdampak terhadap kualitas manusia didaerah tersebut dimana indeks pembangunan manusia ikut meningkat. Dengan meningkatnya perekonomian daerah maka akan dapat meningkatkan infrastruktur untuk menyediakan pelayanan terhadap masyarakat yang optimal sehingga kualitas pendidikan dapat ditingkatkan. Implikasi pada penelitian ini adalah jika pengeluaran pemerintah untuk membiayai keperluan pendidikan semakin meningkat maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan itu akan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bangkalan.

Penjelasan diatas dapat dijelaskan berdasarkan teori Hukum Wagner. Teori Adolf Wagner yang mengutarakan bahwa pengeluaran pemerintah dan aktivitas pemerintah akan meningkat dari waktu ke waktu sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud yang dapat diukur dengan indeks pembangunan manusia. Data pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dari tahun 2011 hingga 2020 menunjukkan tren yang fluktuatif setiap tahunnya. Dalam hal ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu memperhatikan alokasi beserta besaran anggaran untuk sektor pendidikan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena anggaran yang sedikit dan kurang dari 20% dari APBD tidak akan memberi pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

Teori Rostow dan Musgrave menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Adapun Kabupaten Bangkalan masih berada ditahap awal pembangunan ekonomi. Pada tahap ini investasi dari pemerintah sangat dibutuhkan disebabkan pemerintah wajib menyediakan infrastruktur untuk menunjang perkembangan ekonomi. Selain itu pemerintah diwajibkan menyiapkan sarana dan prasarana untuk menaikkan mutu sumber daya manusianya seperti pendidikan, kesehatan dan sarana transportasi.

Kabupaten Bangkalan tahun Anggaran 2020 merumuskan kebijakan pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Prioritas pembangunan dalam segi kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, peningkatan potensi ekonomi masyarakat, peningkatan produktivitas pertanian, dan perbaikan pelayanan publik serta pelayanan ketertiban dan keamanan masyarakat. Sumber daya merupakan peluang yang perlu diusahakan, adanya hambatan harus dihadapi agar dapat mendorong tumbuhnya perekonomian daerah yang produktif. Keterbatasan SDM dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan kesehatan. Sementara untuk meningkatkan potensi ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan dapat diatasi melalui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberdayaan dan perluasan kesempatan kerja. Rendahnya investor dapat teratasi dengan cara memberikan kemudahan untuk layanan perizinan, sehingga Pemkab Bangkalan dapat mendatangkan investor skala besar.

Hasil penelitian tersebut, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Eka at.al (2016) mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah daerah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap PDRB serta IPM di Kalimantan Timur. Hasil penelitian tersebut, menjelaskan bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan tidak berpengaruh terhadap IPM. Hal itu disebabkan karena pengeluaran pemerintah sektor pendidikan masih kurang untuk membangun sebuah IPM yang baik atau masih belum tepat sasaran pengelolaan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan. Dan keterjangkauan masyarakat untuk menikmati pendidikan juga masih kurang.

Penelitian lain yang juga sejenis dan memperoleh hasil yang sama yakni penelitian yang dilakukan oleh Muliza dkk, dengan judul Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan dan PDRB terhadap IPM di Provinsi Aceh. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendidikan tidak berpengaruh terhadap IPM. Tidak signifikannya pengeluaran sektor pendidikan ini dikarenakan masih terdapat disparitas yang cukup besar. Pengeluaran sektor pendidikan ini masih belum berfokus untuk meningkatkan kualitas infrastruktur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga menyebabkan pengaruh yang diberikan langsung terhadap indeks pembangunan manusia belum dapat dirasakan secara langsung.

Penelitian yang dilakukan oleh Nadia Ayu Bhakti dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 2008-2012. Adapun hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa APBD untuk pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM. Hal ini terjadi karena struktur dari pengalokasian dana APBD untuk pendidikan masih belum mampu menggambarkan pembangunan kualitas manusia menjadi sebuah kebijakan dari pembangunan.

3. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bangkalan Tahun 2011-2020

Hasil pengujian data menggunakan STATA 13, menunjukkan bahwa hasil t hitung dari variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X3) adalah sebesar 5,92 dengan nilai probabilitas 0,001. Artinya nilai signifikansi kurang dari 0,05 yang berarti menolak H0 dan menerima H1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM kabupaten Bangkalan. Adapun nilai koefisien model regresi dari variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan sebesar 0,015 yang berarti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila pengeluaran pemerintah sektor kesehatan naik sebesar satu satuan, maka IPM juga akan meningkat sebesar 0,015.

Hal ini sudah sesuai dengan peraturan pemerintah di mana untuk dana kesehatan dikeluarkan sekitar 5% dari APBN. Dengan demikian semakin banyak dana yang dikeluarkan untuk biaya kesehatan maka akan berpengaruh positif terhadap IPM. Kekurangan kalori gizi, ataupun rendahnya derajat tingkat mental yang terbelakang maka pengeluaran pemerintah pada sektor anggaran kesehatan tidak memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan berupa fasilitas, dan pelayanan kesehatan merupakan prasyarat dalam meningkatkan produktivitas masyarakat.[34]

Berdasarkan teori federalisme fiskal, Untuk dapat mengaplikasikan program desentralisasi fiskal ini, maka setiap daerah diwajibkan menyediakan dana untuk biaya pembangunannya sendiri. Pemerintah daerah diwajibkan menyediakan pelayanan publik yang lebih baik serta dapat menggali potensi daerahnya sendiri. Jika pemerintah dapat menjalankan pemerintahan daerahnya dengan baik maka akan berdampak

---

[34] Tofan Wahyu Dwi Prasetio, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi lampung dalam Perspektif Islam", Skripsi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada laju perekonomian yang meningkat. Dan hal itu juga akan berdampak terhadap kualitas manusia didaerah tersebut dimana indeks pembangunan manusia ikut meningkat. Dengan meningkatnya perekonomian daerah maka akan dapat meningkatkan infrastruktur untuk menyediakan pelayanan terhadap masyarakat yang optimal sehingga kualitas kesehatan dapat ditingkatkan. Implikasi pada penelitian ini adalah jika pengeluaran pemerintah untuk membiayai keperluan kesehatan semakin meningkat maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan itu akan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bangkalan.

Penjelasan diatas dapat dijelaskan berdasarkan teori Hukum Wagner. Teori Adolf Wagner yang mengutarakan bahwa pengeluaran pemerintah dan aktivitas pemerintah akan meningkat dari waktu ke waktu sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud yang dapat diukur dengan indeks pembangunan manusia. Data pengeluaran pemerintah untuk kesehatan dari tahun 2011 hingga 2020 menunjukkan tren yang positif dan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memperhatikan alokasi beserta anggaran untuk sektor kesehatan sehingga indikator kesehatan mulai membaik dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah sektor kesehatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teori Rostow dan Musgrave menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Adapun Kabupaten Bangkalan masih berada ditahap awal pembangunan ekonomi. Pada tahap ini investasi dari pemerintah sangat dibutuhkan disebabkan pemerintah wajib menyediakan infrastruktur untuk menunjang perkembangan ekonomi. Selain itu pemerintah diwajibkan menyiapkan sarana dan prasarana untuk menaikkan mutu sumber daya manusianya seperti pendidikan, kesehatan dan sarana transportasi.

Pemerintah telah menjalankan programnya dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dengan memudahkan masyarakat untuk dapat mengakses pelayanan publik di bidang kesehatan, seperti puskesmas, pustu dan lain-lain. Target utama pemerintah yakni menurunkan Angka Kematian Ibu, menurunkan prevalensi gizi buruk serta kurang gizi, dan yang paling utama yakni menurunkan Angka Kematian Bayi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan Umur Harapan Hidup.

Upaya yang telah dilakukan untuk tercapainya target-target di atas, diantaranya dengan terus meningkatkan kompetensi sumber daya tenaga kesehatan dan mendistribusikan hingga ke pelosok desa, dengan memberi pelayanan yang baik serta berstandar nasional. Adanya pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat seperti pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

miskin, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan dengan membangun puskesmas, rumah sakit, polindes dan posyandu yang mendukung adanya alat kesehatan dan obat-obatan.

Kemudahan untuk mengakses perawatan dari fasilitas kesehatan, pemenuhan gizi beserta kalori dan dapat mengakses pendidikan serta mendapatkan pekerjaan sehingga dapat mempunyai penghasilan yang cukup, akan dapat meningkatkan AHH. Rata-rata AHH di Kabupaten Bangkalan selama 10 tahun terakhir (2011-2020) menunjukkan trend yang meningkat yakni dari 69,51 (2011) menjadi 70,18 (2020). AHH merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk mengukur capaian dari kinerja pemerintah dalam pembangunan di bidang kesehatan. Berikut adalah perkembangan AHH penduduk Kabupaten Bangkalan.

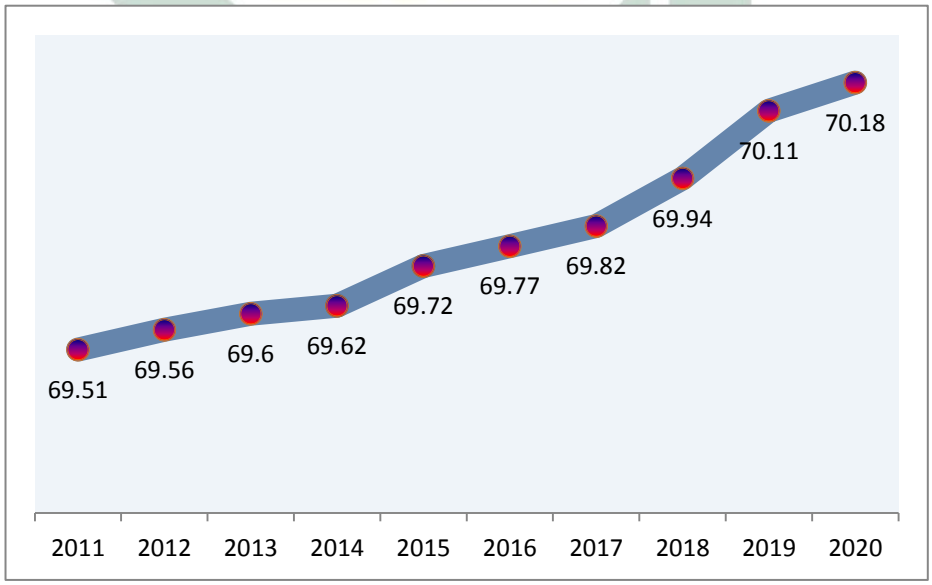

Gambar 5. 2 Angka Harapan Hidup Penduduk Bangkalan Tahun 2011-2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejalan dengan hal itu, maka Nur Baeti (2013) dalam penelitiannya mengenai Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif terhadap IPM. Hal ini menandakan bahwa jika pengeluaran pemerintah sektor kesehatan mengalami kenaikan, maka IPM akan mengalami peningkatan. Begitu juga sebaliknya jika nilai pengeluaran sektor pendidikan menurun, maka nilai IPM juga ikut menurun.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Eka Agustina (2016) mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah daerah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap produk domestik regional bruto serta indeks pembangunan manusia di Kalimantan Timur, menyatakan bahwa pengeluaran anggaran bidang kesehatan menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan. Sehingga apabila terjadi peningkatan pada pengeluaran anggaran bidang kesehatan, maka akan terjadi peningkatan pada IPM melalui angka harapan hidup yang juga ikut meningkat.

Dan juga sejalan dengan penelitiannya Nadya (2012) mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Indonesia periode 2008-2012. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa APBD kesehatan memiliki pengaruh positif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhhadap IPM. Pemerintah telah menyediakan akses pelayanan, termasuk layanan kesehatan bagi warga miskin, pemerintah telah menjalankan berbagai program diantaranya adalah jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) yang merupakan salah satu program yang dananya berasal dari APBD. Dan sebagian besar masyarakat sudah memanfaatkan fasilitas kesehatan yang sudah disediakan oleh pemerintah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Rasio Ketergantungan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bangkalan Tahun 2011-2020, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara simultan, variabel Rasio Ketergantungan Daerah, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bangkalan Tahun 2011-2020. Hal ini menunjukkan bahwa jika Rasio Ketergantungan Daerah, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan meningkat maka diikuti oleh peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bangkalan Tahun 2011-2020.
2. Berdasarkan analisis secara parsial adalah sebagai berikut :
   a). Hasil pengolahan uji menggunakan Stata 13, menunjukkan bahwa variabel Rasio Ketergantungan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bangkalan tahun 2011-2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b). Variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bangkalan.

c). Sedangkan variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bangkalan.

B. Saran

1. Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan masalah pada pembangunan manusia di Kabupaten Bangkalan. Terutama pada masalah rerata lama sekolah dan pertumbuhan output perkapita setiap tahunnya yang masih rendah. Diharapkan dengan meningkatnya rerata lama sekolah dan pertumbuhan output perkapita akan mempengaruhi kenaikan IPM.
2. Berdasarkan ketiga variabel tersebut, pemerintah diharapkan berfokus pada penurunan angka rasio ketergantungan daerah dengan cara meningkatkan PAD atau menurunkan jumlah dana transfer dari pemerintah. Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan alokasi dana untuk sektor pendidikan, karena alokasi dana yang kecil tidak akan mampu meningkatkan IPM. Dan pemerintah juga harus menjaga tren serta menaikkan anggaran untuk sektor kesehatan. Sehingga hal itu dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bangkalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Perlu adanya pendidikan tingkat lanjutan yang mudah diakses terutama di daerah terpencil serta kualitas pendidik yang juga perlu ditingkatkan, selain itu perlu ada kesadaran dari masyarakat setempat akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak di Bangkalan.
4. Untuk memperkuat sumber penerimaan dan optimalisasi PAD, pemerintah dapat menggali potensi pariwisata dan budaya lokal untuk menarik wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, Yusniah. *Kebijakan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia*. Jakarta Selatan: INDOCAMP, 2018.

Ansofino, Jolianis, Yolamalinda, dan Hagi Arfilindo. *Buku Ajar Ekonometrika*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.

Astri, Meylina, Sri Indah Nikensari, dan Harya Kuncara W. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehata Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (JPEB)* 1, no. 1 (2013): 77.

Badan Pusat Statistik. "Indeks Pembangunan Manusia 2020." Last modified 2020. Diakses Mei 8, 2021. https://www.bps.go.id.

Baeti, Nur. "Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011." *Economics Development Analysis Journal* 2, no. 3 (2013): 85–98.

Basuki, Agus Tri. *Pengantar Ekonometrika (Dilengkapi Penggunaan Eviews)*. Yogyakarta: Danisa Media, 2017.

Bawono, Anton, dan Ibnu Arya Fendha Shina. *Ekonometrika Terapan untuk Ekonomi dan Bisnis Islam Aplikasi dengan Eviews*. *Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Salatiga*, 2018.

Eka, Agustina, Rochaida Eny, dan Ulfah Yana. "Pengaruh Pengeluaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintah Daerah Terhadap PDRB Serta IPM Di Kalimantan Timur." *Jurnal Ekonomi Keuangan, dan Manajemen* 12, no. 2 (2016). http://journal.feb.unmul.ac.id/.

Hudaya, Djody Bintang. "Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017)." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–1699.

I Dewa GDE Bisma, dan Hery Susanto. "Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007." *Ganec Swara* 4, no. 3 (2010): 75–86.

Idris, Amiruddin. *EKONOMI PUBLIK*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Kurniawan, Agung Widhi, dan Zarah Puspitaningtyas. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016.

Mohammad, Seyed, dan Javad Razmi. "Investigating the Effect of Government Health Expenditure on HDI in Iran." *Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology* 2, no. 5 (2012): 126–139.

Prasetyia, Ferry. *Bagian VIII: Federalisme*. Malang: Universitas Brawijaya, 2013.

Putra, Windhu. *TATA KELOLA EKONOMI KEUANGAN DAERAH*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Rosadi, Dedi. *EKONOMETRIKA & ANALISIS RUNTUN WAKTU TERAPAN DENGAN EVIEWS*. Yogyakarta: ANDI, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Simanjuntak, Timbul Hamonangan, dan Imam Mukhlis. “Empirical Study about The Interaction Between Equalization Funds, Regional Financial and Human Development Index in Regional Economic.” *International Journal of Economics and Finance* 7, no. 1 (2014).

Siyoto, Sandu, dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2005.

Suharyadi, dan Purwanto. *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern Edisi 2*. Jakarta: Salemba empat, 2013.

Widyatama, Andin. “Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia.” Skripsi pada FEB Universitas Lampung, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id